DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja TW IV
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas I Jawa Barat
Tahun 2025

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Chandra Lesmana Adiguna, S.S.T	Penelaah Teknis Kebijakan	05/01/2026	
2	Dikonsep	Putra Bagus Ardiansyah Maulana	Penelaah Teknis Kebijakan	05/01/2026	
3	Dikonsep	Nadya Putri Andini	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	05/01/2026	
4	Diperiksa	Danny Irawan Siswoyo., S.Si.T	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	05/01/2026	
5	Disetujui	Fathir P. Siregar	Kepala Bagian Tata Usaha	05/01/2026	
6	Disetujui	Ferdy Trisanto Kurniawan, ST., M.Si	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa barat	05/01/2026	

LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)

TRIWULAN IV | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

Copyright © Bagren Hubdat - 2025

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan selama triwulan berjalan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2025 yang memuat gambaran keberhasilan kinerja, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, dan kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. Selain itu, Laporan Monitoring Capaian Kinerja sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi untuk menilai kualitas kinerja organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik "*Good Governance*". Pengukuran Kinerja dilakukan berdasarkan Sasaran Program sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Kami harap laporan ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban dan dasar evaluasi yang konstruktif juga memberikan manfaat secara optimal dalam upaya peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Bandung, 15 Januari 2026
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas I Jawa Barat

Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si.
NIP. 19780201 200312 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulanan merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 setiap triwulanan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 22 (dua puluh dua) dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, BPTD Kelas I Jawa Barat telah melaksanakan dengan sangat baik. Hasil rata-rata persentase capaian SK pada seluruh kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% mengalami peningkatan sebesar 48.7% dari rata-rata persentase capaian SK pada Triwulan III Tahun 2025 dan rata-rata persentase capaian IKK pada seluruh kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100%. dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan sangat baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi BPTD Kelas I Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam *Draft* Rencana Strategis BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025-2029.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.2.2 Bagan Struktur Organisasi 3
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA 5
I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN 6
I.5 SISTEMATIKA LAPORAN 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 19
II. 1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS 19
II. 2 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 35
III. 1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA 35
III. 2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 35
III.3 SK 1.1.1 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK 49
III.3.1 IKK 1.1.1.A Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan 49
III.4 SK 1.2.1 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan 53
III.4.1 IKK 1.2.1.B Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP 53
III.5 SK 2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan 57
III.5.1 IKK 2.1.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM 57
III.5.2 IKK 2.1.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM 61
III 5.3 IKK 2.1.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM 65
III.5.4 IKK 2.1.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM 69
III.5.5 IKK 2.1.5 Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ 73
III.6 SK 2.2 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP 78
III.6.1 IKK 2.2.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM 78
III.8 SK 3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang Dan Barang 82
III.8.1 IKK 3.1.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata 82

III.8.2 IKK 3.1.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang.....86
IIIs.8.4 IKK 3.1.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan.....91
III.9 SK 3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active Dan Passive Safety 95
III.9.1 IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman 95
III.9.2 IKK 3.2.2 Jumlah Alat uji yang telah dikalibrasi.....99
III.10 SK 3.3 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan.....102
III.10.1 IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis 102
III.8.6 IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman 106
III.11 SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat 109
III.11.1 IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat.....109
III.11.2 IKK 4.2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) 112
IIIs.11.3 IKK 4.3 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis....116
III.11.4 IKK 4.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) 119
III.11.5 IKK 4.6 Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE).....123
III.11.6 IKK 4.7 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.....125
III.11.7 IKK 4.8 Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat.....129
III.12 REALISASI ANGGARAN.....132
III.12.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025.....132
III.12.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025 135
III. 13 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 135
III.13.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....135
III.14 HAMBATAN DAN KENDALA 136s
BAB IV PENUTUP.....137
IV. PENUTUP 137
IV.1. RINGKASAN CAPAIAN 137
IV.2. HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB 139

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Komposisi Pegawai BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan IV..... 6
Tabel II. 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025..... 23
Tabel II. 2 Perjanjian Kinerja BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025 26
Tabel II. 3 Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025..... 29
Tabel II. 4 Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025..... 34
Tabel III. 1 Capaian Seluruh Kegiatan BPTD Kelas I Jawa Barat TW II Tahun 2025 40
Tabel III. 2 Capaian Seluruh Kegiatan BPTD Kelas I Jawa Barat TW III Tahun 2025 45
Tabel III. 3 Capaian Seluruh Kegiatan BPTD Kelas I Jawa Barat TW IV Tahun 2025 48
Tabel IV. 4 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025..... 134
Tabel IV. 6 Rincian Realokasi Per Sumber Dana Tahun 2025..... 135
Tabel IV. 7 Realisasi Anggaran s/d bulan Desember Tahun 2025 135

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi BPTD Kelas I Jawa Barat 3
Gambar IV. 1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 50
Gambar IV. 2 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 54
Gambar IV. 3 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 58
Gambar IV. 4 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 62
Gambar IV. 5 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 66
Gambar IV. 6 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 70
Gambar IV. 7 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 74
Gambar IV. 8 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 79
Gambar IV. 9 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 83
Gambar IV. 10 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 87
Gambar IV. 11 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 92
Gambar IV. 12 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 95
Gambar IV. 13 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 99
Gambar IV. 14 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 103
Gambar IV. 15 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 107
Gambar IV. 16 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 110
Gambar IV. 17 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 113
Gambar IV. 18 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 116
Gambar IV. 19 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 120

Gambar IV. 20 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....123
Gambar IV. 21 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....126
Gambar IV. 22 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....129

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Monitoring Capaian Kerja merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

BPTD Kelas I Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang mandiri juga perlu untuk menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja sebagai acuan dan tolak ukur pengukuran kinerja setiap triwulannya. Penyusunan LMCK oleh BPTD Kelas I Jawa Barat sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan LMCK Triwulan IV BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025 sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun yang akan datang.
Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode triwulanan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Kelas I Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal Barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
b. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :
    1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    2) Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
    3) Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
    4) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
    5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
    6) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
    7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2.2 Bagan Struktur Organisasi

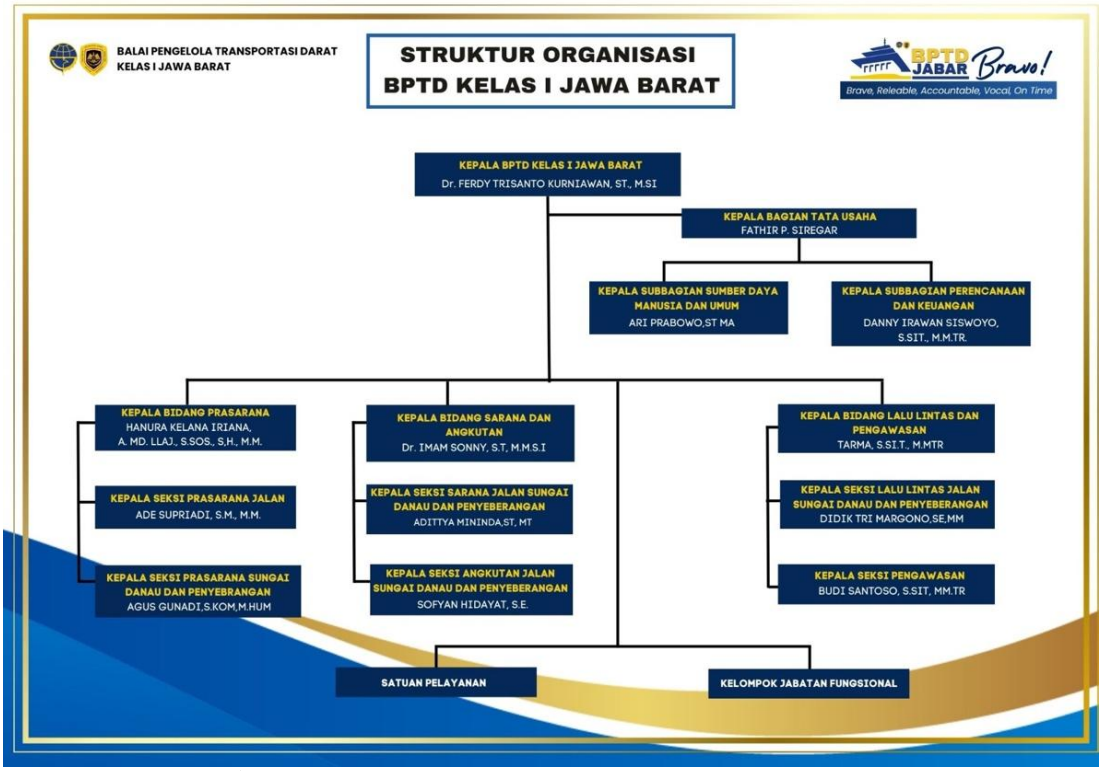

Gambar I. 1 Struktur Organisasi BPTD Kelas I Jawa Barat
Sumber : Pengelola PPID dan Kehumasan BPTD Kelas I Jawa Barat

Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

a. Bagian Tata Usaha

   Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan kearsipan, dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Bidang Prasarana Jalan dan Sungai Danau dan Penyeberangan

   Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian Terminal Tipe A, Terminal Barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan,

serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

c. Bidang Sarana Jalan dan Angkutan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

d. Bidang Lalulintas dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

e. Satuan Pelayanan

Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian dan/atau

seluruh tugas pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal Barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengendalian dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat per tanggal 31 Desember 2025 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 320 (Tiga ratus dua puluh) orang dan Pegawai Pemerintah (PPPK) Sebanyak 432 (Empat ratus tiga puluh dua) Orang dan Pegawai *Outsourching* (OS) 20 (dua puluh) orang. Alokasi jumlah pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai *Outsourching* (OS), untuk masing-masing satuan pelayanan dan kantor induk sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI			
		PNS	P3K	OS	JUMLAH
A	Kantor Induk	56	27	13	96
B	Satpel Terminal				
	1. TTA Harjamukti – Cirebon	18	20	-	38
	2. TTA Indihiang – Tasikmalaya	19	20	-	39
	3. TTA KH. Ahmad Sanusi - Sukabumi	15	36	1	52
	4. TTA Ciakar – Sumedang	10	25	-	35
	5. TTA Guntur Melati – Garut	22	38	2	62
	6. TTA Banjar	17	30	1	15
	7. TTA Cikampek - Klari	10	16	1	27
	8. TTA Subang	7	23	-	30
	9. TTA Kertawangunan – Kuningan	11	17	-	28
	10.TTA Leuwipanjang – Bandung	26	50	-	76
C	Satpel UPPKB				
	1. UPPKB Balonggandu – Karawang	21	20	1	42
	2. UPPKB Losarang – Indramayu	17	19	-	36
	3. UPPKB Kemang - Bogor	13	8	1	22
	4. UPPKB Tomo – Sumedang	19	16	-	35
	5. UPPKB Gentong – Tasikmalaya	16	18	-	34
	6. UPPKB Cibaragalan - Purwakarta	12	11	-	23
	7. UPPKB Bojong - Cianjur (belum beroperasi)	-	-	-	-
D	Wilayah Kerja TSDP				
	1. Satuan Pelayanan Jangari Cirata	3	9	-	12

	2. Satuan Pelayanan Maroko Saguling	3	4	-	7
	3. Satuan Pelayanan Serpis Jatiluhur	1	8	-	9
	4. Satuan Pelayanan Situ Panjalu	1	11	-	12
	5. Satuan Pelayanan Majingklak Pangandaran	3	6	-	9
TOTAL		320	432	20	772

Tabel I. 1 Komposisi Pegawai BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan IV
Sumber : Pengelola Kepegawain BPTD Kelas I Jawa Barat

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009
Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Serta Peraturan Perubahanya

d. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

2. Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat per tanggal 30 September 2025 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 317 (Tiga ratus tujuh belas) orang dan Pegawai Pemerintah (PPPK) Sebanyak 466 (Empat ratus enam puluh enam) Orang dan Pegawai *Outsourching* (OS) 19 (Sembilan belas) orang.

3. Anggaran

Terdapat program blokir efisiensi anggaran yang cukup besar, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat hanya dapat memenuhi dengan cara mengoptimalkan anggaran yang tersedia secara proposional terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

4. Isu Strategis

Isu Strategis BPTD Kelas I Jawa Barat adalah:

a. Keselamatan Lalu Lintas;
b. Penanganan ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
c. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal Tipe A dan UPPKB serta Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan;
d. Penanganan Terminal Bayangan.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2025 adalah:

a. Rencana Strategis;
b. Perjanjian Kinerja;
c. Indikator Kinerja Kegiatan;
d. Pengukuran Kinerja;
e. Evaluasi Kinerja.

I.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
    1. Tugas Pokok Dan Fungsi
    2. Bagan Struktur Organisasi
C. SUMBER DAYA MANUSIA
D. POTENSI, ISU, STRATEGIS DAN PERMASALAHAN
    1. Kewenangan
    2. Sumber Daya Manusia
    3. Anggaran
    4. Isu Strategis
    5. Ruang Lingkup
E. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS
    1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
B. URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
    1. Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

A. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
    1. SK 1.1.1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK
        a. IKK 1.1.1.A Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan
            1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
            2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
            3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
                a) Dasar Hukum
                b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
                c) Faktor Keberhasilan
                d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
                e) Perhitungan Realisasi Kinerja

f) Perhitungan Capaian Kinerja
g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

2. SK 1.2.1 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan
   a. IKK 1.2.1.B Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP
      1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
      2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
      3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
         a) Dasar Hukum
         b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
         c) Faktor Keberhasilan
         d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
         e) Perhitungan Realisasi Kinerja
         f) Perhitungan Capaian Kinerja
         g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
      4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
3. SK 2.1 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan
   a. IKK 2.1.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM
      1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
      2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
      3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
         a) Dasar Hukum
         b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
         c) Faktor Keberhasilan
         d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
         e) Perhitungan Realisasi Kinerja
         f) Perhitungan Capaian Kinerja
         g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
      4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

b. IKK 2.1.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM
    1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
    2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
    3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
        a) Dasar Hukum
        b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
        c) Faktor Keberhasilan
        d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
        e) Perhitungan Realisasi Kinerja
        f) Perhitungan Capaian Kinerja
        g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
    4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
c. IKK 2.1.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM
    1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
    2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
    3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
        a) Dasar Hukum
        b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
        c) Faktor Keberhasilan
        d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
        e) Perhitungan Realisasi Kinerja
        f) Perhitungan Capaian Kinerja
        g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
    4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
d. IKK 2.1.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM
    1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
    2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
    3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
        a) Dasar Hukum
        b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
        c) Faktor Keberhasilan
        d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
        e) Perhitungan Realisasi Kinerja

f) Perhitungan Capaian Kinerja
g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

e. IKK 2.1.5 Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
a) Dasar Hukum
b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
c) Faktor Keberhasilan
d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
e) Perhitungan Realisasi Kinerja
f) Perhitungan Capaian Kinerja
g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

4. SK 2.2 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP

a. IKK 2.2.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
a) Dasar Hukum
b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
c) Faktor Keberhasilan
d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
e) Perhitungan Realisasi Kinerja
f) Perhitungan Capaian Kinerja
g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

5. SK 3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

a. IKK 3.1.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
   a) Dasar Hukum
   b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
   c) Faktor Keberhasilan
   d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
   e) Perhitungan Realisasi Kinerja
   f) Perhitungan Capaian Kinerja
   g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

b. IKK 3.1.2 Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang
   1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
   2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
   3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
      a) Dasar Hukum
      b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
      c) Faktor Keberhasilan
      d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
      e) Perhitungan Realisasi Kinerja
      f) Perhitungan Capaian Kinerja
      g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
   4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

c. IKK 3.1.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan
   1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
   2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
   3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
      a) Dasar Hukum
      b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
      c) Faktor Keberhasilan
      d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
      e) Perhitungan Realisasi Kinerja
      f) Perhitungan Capaian Kinerja
      g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
   4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

6. SK 3.2 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi *active* dan *passive safety*
    a. IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman
        1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
        2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
        3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
            a) Dasar Hukum
            b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
            c) Faktor Keberhasilan
            d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
            e) Perhitungan Realisasi Kinerja
            f) Perhitungan Capaian Kinerja
            g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
        4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
    b. IKK 3.2.2 Jumlah Alat uji yang telah dikalibrasi
        1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
        2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
        3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
            a) Dasar Hukum
            b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
            c) Faktor Keberhasilan
            d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
            e) Perhitungan Realisasi Kinerja
            f) Perhitungan Capaian Kinerja
            g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
        4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
7. SK 3.3 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan
    a. IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis
        1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
        2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
        3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
            a) Dasar Hukum

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
c) Faktor Keberhasilan
d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
e) Perhitungan Realisasi Kinerja
f) Perhitungan Capaian Kinerja
g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

b. IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
a) Dasar Hukum
b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
c) Faktor Keberhasilan
d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
e) Perhitungan Realisasi Kinerja
f) Perhitungan Capaian Kinerja
g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

8. SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

a. IKK 4.1 Kegiatan perencanaan pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
a) Dasar Hukum
b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
c) Faktor Keberhasilan
d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
e) Perhitungan Realisasi Kinerja
f) Perhitungan Capaian Kinerja
g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

b. IKK 4.2 Kegiatan terkait akuntabilitas kinerja BPTD (Nilai SAKIP)

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
   a) Dasar Hukum
   b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
   c) Faktor Keberhasilan
   d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
   e) Perhitungan Realisasi Kinerja
   f) Perhitungan Capaian Kinerja
   g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

c. IKK 4.3 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis
1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
   a) Dasar Hukum
   b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
   c) Faktor Keberhasilan
   d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
   e) Perhitungan Realisasi Kinerja
   f) Perhitungan Capaian Kinerja
   g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

d. IKK 4.4 Tingkat lanjut rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (Tindak Lanjut sampai Tahap Proses)
1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
   a) Dasar Hukum
   b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
   c) Faktor Keberhasilan
   d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
   e) Perhitungan Realisasi Kinerja
   f) Perhitungan Capaian Kinerja
   g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

e. IKK 4.6 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)
   1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
   2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
   3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
      a) Dasar Hukum
      b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
      c) Faktor Keberhasilan
      d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
      e) Perhitungan Realisasi Kinerja
      f) Perhitungan Capaian Kinerja
      g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
   4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

f. IKK 4.7 Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa
   1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
   2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
   3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
      a) Dasar Hukum
      b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
      c) Faktor Keberhasilan
      d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
      e) Perhitungan Realisasi Kinerja
      f) Perhitungan Capaian Kinerja
      g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
   4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

g. IKK 4.8 Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)
   1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
   2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
   3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
      a) Dasar Hukum
      b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
      c) Faktor Keberhasilan

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
e) Perhitungan Realisasi Kinerja
f) Perhitungan Capaian Kinerja
g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

C. REALISASI ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran Tahun 2025
   a) Pagu Anggaran
      1) Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
      2) Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
      3) Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
   b) Blokir Efisiensi Tahun 2025
      1) Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
      2) Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
      3) Rincian Realokasi Per Sumber Dana Tahun 2025
      4) Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
2. Realisasi Anggaran Tahun 2025
   a) Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
   b) Rincian Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
   c) Rincian Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
3. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
4. Perbandingan Pagu dan Realisasi

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

E. HAMBATAN DAN KENDALA

BAB IV PENUTUP

A. PENUTUP

- Ringkasan Capaian

B. HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB

LAMPIRAN

- Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditanda tangani);
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditanda tangani);
- Rencana Aksi Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditanda tangani);
- Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Justifikasi Pengoperasian Wilayah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Provinsi Jawa Barat;
- Serta *Evidence* lainya yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II. 1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 yang saat ini dalam proses penyusunan, merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 sehingga dapat bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat Tahun 2025.

1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam *draft* Renstra BPTD Tahun 2025-2029, dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan dan tercantum dalam perjanjian kinerja. Adapun tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat Tahun 2025 sesuai Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025
-1	-2		-3		-4	-5
1	SK 2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan	Trayek	6
2	SK 3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1	Monitoring dan evaluasi layanan AKAP terhadap terminal tipe A	Kegiatan	10
3	SK 5	Meningatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5.2	Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP	Trayek	2
4	SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Paket	1
			IKK 7.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi	10
			IKK 7.5	Jumlah operasional layanan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor sesuai SPM	Lokasi	6

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025
			IKK 7.6	Monitoring evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas dan pokok	Kegiatan	2
			IKK 7.7	Kegiatan pengendalian lalu lintas *event* khusus	Kegiatan	4
5	SK 8	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.4	Operasional layanan pelabuhan sungai dan danau sesuai SPM	Lokasi	5
6	SK 9	Meningkatnya keselamatan angkutan penumpang dan barang	IKK 9.1	Jumlah kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan pariwisata	Kegiatan	3
			IKK 9.2	Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3
			IKK 9.3	Jumlah kegiatan pengawasan bengkel karoseri	Laporan	1
			IKK 9.4	Pengawasan evaluasi MRLL dan andalalin	Kegiatan	1
			IKK 9.5	Pengawasan evaluasi pengadaan perlengkapan jalan	Kegiatan	3
			IKK 9.6	Pengawasan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan	Kegiatan	1

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025
7	SK 10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi *active* dan *passive safety*	IKK 10.1	Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	Laporan	12
			IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	1
			IKK 10.4	Jumlah alat pengujian berkala yang menerapkan *blue full cycle*	Kegiatan	3
8	SK 11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1	Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis	Kegiatan	3
9	SK 13	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 13.1	Kegiatan perencanaan pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	4
			IKK 13.2	Kegiatant erkait akuntabilitas kinerja (nilai SAKIP) BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	1
			IKK 13.3	Kegiatan terkait maturitas SPIP BPTD Kelas I Jawa Barat	Dokumen	2
			IKK 13.4	Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran	Kegiatan	15

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025
				BPTD Kelas I Jawa Barat		
			IKK 13.5	Tingkat lanjut rekomendasi audit/pemeriksanaan	Dokumen	1
			IKK 13.6	Kegiatan pengelolaan aset BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	3
			IKK 13.7	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (lapor) yang sudah diselesaikan BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	1
			IKK 13.9	Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa	Dokumen	2
			IKK 13.10	Kegiatan peneglolaan SDM unit kerja	Kegiatan	3
			IKK 13.11	Kegiatan mendukung penerapan Zona Integritas (ZI)	Dokumen	1
			IKK 13.12	Kegiatan mendukung kebijakan dan reformasi hukum	Dokumen	1

Tabel II. 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

II. 2 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan dan tercantum dalam perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	95
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	95
		IKK1.6	Jumlah 24asyaraka SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di 25asyaraka SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	95
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK3.5	Jumlah 25asyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelengaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	87

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Infrastruktur Konektifitas	Rp. 134.936.535.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 15.810.704.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 77.874.408.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.173.783.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 8.113.640.000
6.	Pogram Dukungan Manajemen	Rp. 52.100.656.000
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.791.714.000
8.	Pengelolaan Perencanaan,Keuangan,BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 45.308.942.000
	TOTAL	**Rp. 187.037.191.000**

Tabel II. 2 Perjanjian Kinerja BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025

1. **Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Dalam perkembangannya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 BPTD Kelas I Jawa Barat mengalami perubahan terutama dalam hal nomenkelatur Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan hasil penyusunan *draft* Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan BPTD Tahun 2025-2029, serta adanya pergantian pejabat struktural dilingkungan BPTD Kelas I Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	95
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan	Lokasi	10

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*
			terminal barang yang beroperasi		
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	95
		IKK1.6	Jumlah 27asyaraka SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di 27asyaraka SDP	%	100

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	95
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK3.5	Jumlah 28asyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelengaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen	Nilai	87

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*
			Perhubungan Darat		

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Infrastruktur Konektifitas	Rp. 134.936.535.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 15.810.704.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 77.874.408.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.173.783.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 8.113.640.000
6.	Pogram Dukungan Manajemen	Rp. 52.100.656.000
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.791.714.000
8.	Pengelolaan Perencanaan,Keuangan,BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 45.308.942.000
	TOTAL	**Rp. 187.037.191.000**

Tabel II. 3 Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025

2. Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam perkembangannya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 BPTD Kelas I Jawa Barat mengalami perubahan terutama dalam hal nomenkelatur Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan hasil penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan BPTD Tahun 2025-2029, serta adanya pergantian pejabat struktural dilingkungan BPTD Kelas I Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		MENJADI	
					SATUAN	TARGET
-1	*-2*		*-3*		*-4*	*-5*
1	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6
2	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1.B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	2
3	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Paket	1
			IKK 2.1.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi	10
			IKK 2.1.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk	Unit	1

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		MENJADI	
					SATUAN	TARGET
				memenuhi SPM		
			IKK 2.1.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	6
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	7
4	SK 2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5
5	SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3
			IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	4

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		MENJADI	
					SATUAN	TARGET
			IKK 3.1.3	Jumlah Fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung	Unit	1
6	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Laporan	1
			IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi	Kegiatan	2
7	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah perlengkapan jalan yan dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis	Kegiatan	23
			IKK 3.3.2	Jumlah lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	1
8	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Kegiatan	1

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		MENJADI	
					SATUAN	TARGET
			IKK 4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	82,5
			IKK 4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Realisasi)	Persentase	95
			IKK 4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	60
			IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	80
			IKK 4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3
			IKK 4.8	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	16

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Infrastruktur Konektifitas	Rp. 138.236.200.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 13.466.840.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 72.027.124.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 41.428.596.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 11.313.640.000
6.	Pogram Dukungan Manajemen	Rp. 78.678.241.000
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 11.091.714.000
8.	Pengelolaan Perencanaan,Keuangan,BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 67.586.527.000
	TOTAL	**Rp. 216.914.441.000**

Tabel II. 4 Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas I Jawa Barat Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntanbilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara *periodic* atau pencapaian kinerja suatu intansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat melalui aplikasi E-performance dimulai dari target- target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi E-performance yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama sama antara pengelola data dan laporan kinerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat.

III. 2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas *inputing*, *updating* dan *monitoring* pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan secara mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada umumnya serta Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat pada khususnya, dengan alamat http://www.eperformance.dephub.go.id dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan system aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

  Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

  - Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} X\ 100\%}$$

  - Apabila realisasi pencapaian semakin rendah menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} X\ 100\%}$$

Pengukuran Kinerja BPTD Kelas I Jawa Barat

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2025.

Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Monitoring Capaian Kinerja, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Untuk mewujudkan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dari total 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BPTD Kelas I Jawa Barat dan bermuara pada terwujudnya 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat maka diperoleh data Capaian Kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja sebagaimana tampak pada table berikut:

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TW II			CAPAIAN TW II
				T	R	C	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Moda Transportasi					100%	76%
IKK 1.1.	Persentase Keperintisan Angkutan Jalan	%	95	50	50	100%	53%
IKK.1.3.	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroprasi	Lokasi	10	10	10	100%	100%
IKK.1.5.	Persentase Pelaksanaan Layanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan	%	95	50	50	100%	53%
IKK.1.6.	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroprasi	Lokasi	15	15	15	100%	100%
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat					100%	50%
IKK.2.1.	Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	100	50	50	100%	50%
IKK.2.2.	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	100	50	50	100%	50%
IKK.2.3.	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	50	50	100%	50%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					51%	17%
IKK.3.1.	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	95	20	50	53%	21%
IKK.3.2.	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	10	10	100%	29%
IKK.3.5.	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	100	0	0	0%	0%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					98%	98%
IKK.5.1.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	87	85	85	98%	98%
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					98%	98%
IKK.6.1.	Tingkat Penyelenggaran Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan darat	Nilai	87	85	85	98%	98%
Rata-rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						89%	68%
Rata-rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						87%	58%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100%(IKP>100%)						8	2
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Kurang dari 100% (0<IKP<100%)						4	10

Tabel III. 1 Capaian Seluruh Kegiatan BPTD Kelas I Jawa Barat TW II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
							T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	SK 2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
2	SK 3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	10	1	0	0	4	0	0	7	0	0
3	SK 5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5.2	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	2	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
4	SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Paket	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IKK 7.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi	10	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%
			IKK 7.5	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Lokasi	6	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
							T	R	C	T	R	C	T	R	C
			IKK 7.6	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IKK 7.7	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Kegiatan	4	2	2	50%	2	2	50%	2	2	50%
5	SK 8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%
6	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3	0	0	0	0	2	67%	2	2	67%
			IKK 9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3	0	0	0	0	2	67%	2	2	67%
			IKK 9.3	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IKK 9.4	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IKK 9.5	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	3	0	0	0	0	0	0	2	1	33%

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
							T	R	C	T	R	C	T	R	C
			IKK 9.6	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SK 10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Laporan	12	3	0	0	6	0	0	9	9	0
			IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
			IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian Berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	3	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
8	SK 11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Kegiatan	3	0	0	0	1	1	33%	2	1	33%
9	SK 13	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 13.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			IKK 13.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
							T	R	C	T	R	C	T	R	C
			IKK 13.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP BPTD Kelas I Jawa Barat	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IKK 13.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	15	4	4	27%	7	7	47%	12	12	80%
			IKK 13.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IKK 13.6	Kegiatan Pengelolaan Aset BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	3	0	0	0	0	0	0	2	2	67%
			IKK 13.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IKK 13.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	1	50%
			IKK 13.10	Kegiatan Pengelolaan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0
			IKK 13.11	Kegiatan mendukung penerapan Zona Integritas (ZI)	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
							T	R	C	T	R	C	T	R	C
			IKK 13.12	Kegiatan mendukung kebijakan dan reformasi hukum	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Rata Rata Persentase Capaian SK								**39,2%**			**45,5%**			**51,3%**
	Rata Rata Persentase Capaian IKK								**19,2%**			**25,5%**			**34,9%**
	Jumlah IKK Yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100% (IKK≥100%)								**5**			**5**			**6**
	Jumlah IKK Kurang Dari 100% (0%≤IKK<100%)								**25**			**25**			**24**

Tabel III. 2 Capaian Seluruh Kegiatan BPTD Kelas I Jawa Barat TW III Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		
							T	R	C
1.	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	6	6	6
2.	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1.B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	2	2	2	2
3.	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Paket	1	1	1	1
			IKK 2.1.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi	10	10	10	10
			IKK 2.1.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1	1	1
			IKK 2.1.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	6	6	6	6
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	7	7	7	7
4.	SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 2.2.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5	5	5	5

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		
							T	R	C
5.	SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3	3	3	3
			IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	4	4	4	4
			IKK 3.1.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung	Unit	1	1	1	1
6.	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi *active* dan *passive safety*	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Laporan	1	1	1	1
			IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi	Kegiatan	2	2	2	2
7.	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Kegiatan	22	22	22	22
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	1	1	1	1

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		
							T	R	C
8.	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	1	1
			IKK 4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	82,5	82,5	82,5	82,5
			IKK 4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis	Presentase	95	95	95	95
			IKK 4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	60	60	60	60
			IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	80	80	80	80
			IKK 4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	3	3	3
			IKK 4.8	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	16	16	16	16

Tabel III. 3 Capaian Seluruh Kegiatan BPTD Kelas I Jawa Barat TW IV Tahun 2025

Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 8 Sasaran Kegiatan (SK) dan didalamnya terdapat 22 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPTD Kelas I Jawa Barat. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

III.3 SK 1.1.1 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK

Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) 1.1.1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

III.3.1 IKK 1.1.1.A Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan

Angkutan Jalan Perintis adalah angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat. Adapun keperintisan angkutan jalan nasional yang dimaksud adalah penyelenggaraan penyediaan layanan angkutan umum pada sejumlah trayek di wilayah daerah Jawa Barat yang belum terdapat pelayanan angkutan umum disana. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan perekonomian warga pada trayek yang dilayani.

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019. Ada dua kriteria untuk menetapkan angkutan jalan perintis, yaitu faktor finansial dan faktor keterhubungan.

   Kriteria faktor finansial berupa tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesbilitas angkutan antar daerah masih rendah, trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

   Sedangkan kriteria faktor keterhubungan dapat berupa menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum, menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia, melayani daerah yang terkena dampak bencana alam, dan melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis atau Angkutan udara perintis. Dalam hal pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

   - Memiliki trayek tetap dan teratur;
   - Sifat pelayanan tidak boleh terhenti;

- Tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya;
- Lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal, halte, atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- Mencantumkan informasi Trayek dan tarif pada terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- Memberikan pelayanan angkutan paling sedikit 1 keberangkatan dalam setiap hari; dan
- Menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% dari Jumlah kendaraan yang dioperasikan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan sebesar 6 (Enam) jika dibandingkan dengan target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 6 (Enam) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:

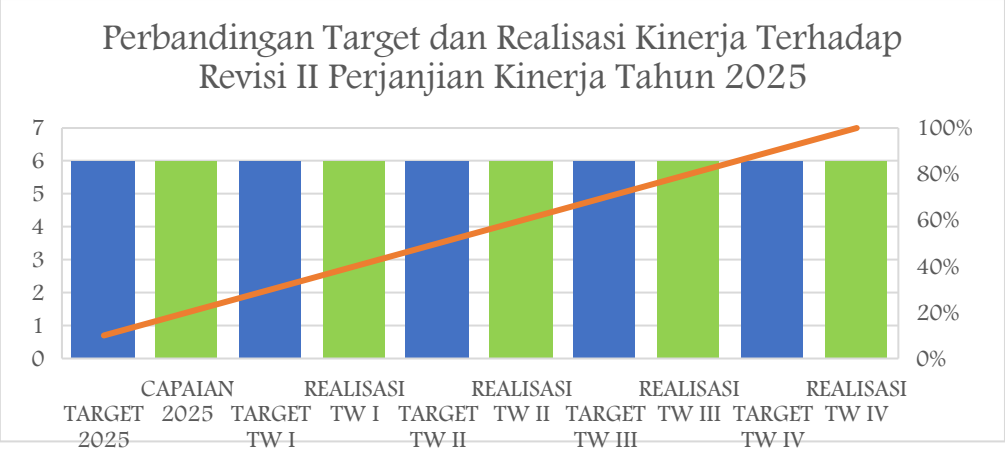

Gambar IV. 1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8613 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023, menetapkan jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2025 di 38 (tiga puluh delapan) Provinsi di Indonesia dengan jumlah trayek sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) trayek.

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan. Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

c) Faktor Keberhasilan

- Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan angkutan perintis.
- Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemda terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan.
- Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut.
- Minat masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan angkutan perintis tersebut.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Load Factor yang rendah
- Makin maraknya pengelolaan kendaraan komersil dengan kemudahan aksesnya.

- Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh.
- Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari layanan pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di wilayah Bandung dan Bogor Triwulan IV Tahun 2025 diketahui bahwa :

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja = \frac{Jumlah\ Realisasi\ Trayek\ Pada\ Tahun\ (n)}{Jumlah\ Trayek\ Yang\ Direncanakan}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja = \frac{6}{6}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan sebesar 100%

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2025 yaitu Rp 4.139.081.000,- dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2025 Rp 4.138.882.469,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional), kode anggaran (4637.QAH.001).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan Triwulan IV Tahun 2025 yang menunjukan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Kelas I Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan melalui:

- Mempercepat proses verivikasi pembayaran agar anggaran yang tersedia dapat terserap sesuai rencana;
- Terus berupaya mengoptimalkan rute anggaran yang tersedia;
- Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan angkutan jalan perintis secara mandiri.

III.4 SK 1.2.1 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan

Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) 1.21 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

III.4.1 IKK 1.2.1.B Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

adalah kegiatan Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP adala salah satu bentuk layanan subsidi transportasi angkutan penyeberangan yang bertujuan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dan terluar di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Jumlah layanan ini di ukur dalam satuan lintasan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP sebesar 2 (dua) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 (dua) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:

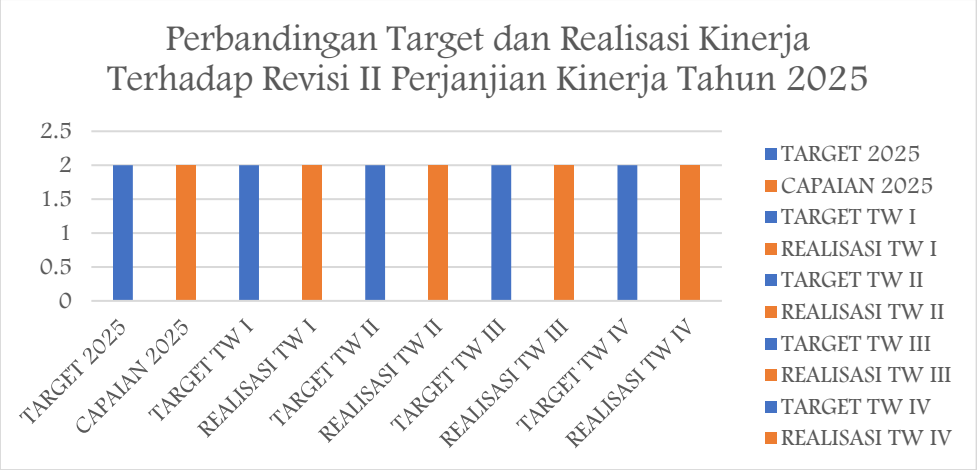

Gambar IV. 2 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk mengalokasikan anggaran dan memberikan subsidi dalam bentuk kompensasi kepada badan usaha seperti ASDP untuk penyelenggaraan layanan public;
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. Peraturan ini menegaskan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, termasuk dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang transportasi, yang mencakup layanan angkutan penyeberangan perintis;
- Peraturan Menteri yang mengatur skema dan perhitungan subsidi tahunan. Setiap tahun, pemerintah menerbitkan peraturan menteri baru yang mengikat operator seperti ASDP untuk menjalankan rute-rute perintis tertentu dengan alokasi subsidi dari APBN.

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan. Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

c) Faktor Keberhasilan

- Keberhasilan Ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk subsidi sangat penting. Keterlambatan pembayaran subsidi dari pemerintah dapat memengaruhi kelancaran operasional dan kualitas pelayanan;
- Peningkatan kepercayaan public yaitu Peningkatan kualitas layanan, keamanan, dan ketepatan waktu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut, sehingga lebih banyak orang yang bersedia menggunakan layanan ini
- Pengawasan yang transparan dan akuntabel oleh pemerintah dan lembaga pengawas, termasuk DPR, memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan tepat sasaran

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Ketidakjelasan jadwal yaitu Di beberapa rute perintis, terutama di daerah 3T, jadwal keberangkatan kapal sering kali tidak pasti atau mengalami keterlambatan. Ini dapat merugikan masyarakat yang bergantung pada angkutan tersebut untuk beraktivitas dan mendistribusikan barang
- Pemangkasan anggaran subsidi atau Kebijakan pemerintah untuk memangkas subsidi transportasi dapat berdampak signifikan pada layanan perintis. Hal ini bisa mengganggu kontinuitas operasional dan memaksa ASDP untuk mengurangi frekuensi

atau bahkan menutup beberapa rute yang kurang menguntungkan;

- Kondisi alam yang ekstrem yaitu Faktor cuaca seperti gelombang tinggi, badai, dan arus kuat di laut dapat mengganggu atau membatalkan pelayaran. Hal ini dapat menimbulkan keluhan dari masyarakat dan mengganggu konektivitas

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari layanan pelaksanaan Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Triwulan IV Tahun 2025 diketahui bahwa :

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja = \frac{Jumlah\ Realisasi\ Lintasan\ Pada\ Tahun\ (n)}{Jumlah\ Lintasan\ Yang\ Direncanakan} X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Kegiatan Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja = \frac{2}{2} X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP sebesar 100%.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025 yaitu Rp 9.327.759.000 ,-, dengan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 9.327.431.300,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Layanan Angkutan Penyebrangan Perintis (Prioritas Nasional), kode anggaran (4637.QAH.008.051).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Mengupayakan realisasi anggaran sesuai dengan jadwal atau RPD yang telah ditetapkan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rute perintis yang ada untuk memastikan efektivitasnya. Dengan memanfaatkan data penggunaan, serta mengidentifikasi rute yang tidak efisien atau sudah dapat dilayani secara komersial, lalu membuka rute baru di wilayah yang lebih membutuhkan;
- Keterlibatan masyarakat dan evaluasi berkala: Membangun mekanisme umpan balik yang lebih efektif dari masyarakat di daerah 3T. Evaluasi layanan secara berkala dengan melibatkan pengguna jasa akan membantu mengidentifikasi masalah dan meningkatkan kualitas layanan sesuai kebutuhan riil Masyarakat.

III.5 SK 2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) 2.1 diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

III.5.1 IKK 2.1.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Menurut PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan (dan dokumen-dokumen BPTD / Ditjen Perhubungan Darat), SPM terminal penumpang mencakup beberapa aspek pelayanan, di antaranya:

- Pelayanan keselamatan;
- Pelayanan keamanan;
- Pelayanan kehandalan/keteraturan;
- Pelayanan kenyamanan;
- Pelayanan kemudahan/keterjangkauan;
- Pelayanan kesetaraan.

Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayananya untuk memenuhi SPM berarti terminal Tipe A dimana fasilitas dan / atau pelayanannya telah di-upayakan agar memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti PM (Peraturan

Menteri) terkait penyelenggaraan terminal angkutan jalan dan penyelenggaraan terminal penumpang.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM sebesar 1 (satu) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 (satu) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:

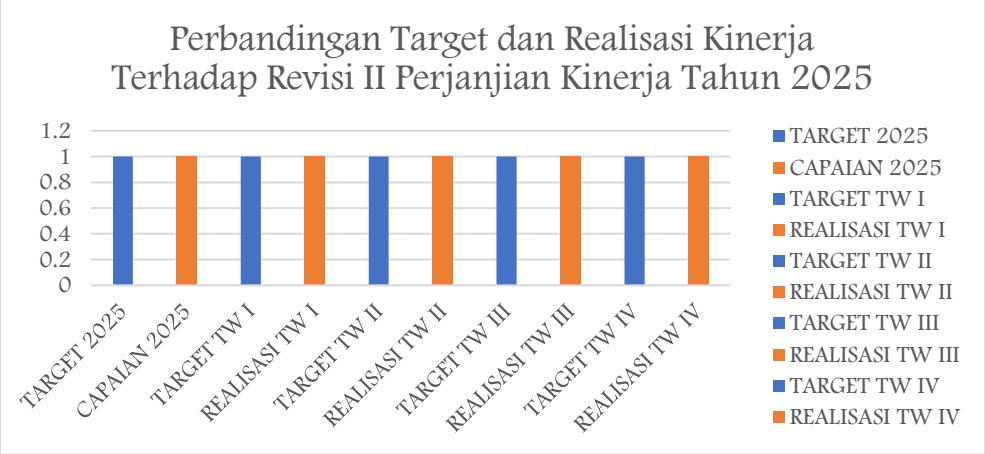

Gambar IV. 3 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 24 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan terminal penumpang
- Peraturan Pemerintah (terbaru) tentang Standar Pelayanan Minimal (PP No. 2 Tahun 2018) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Permenhub 40/2015)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 24 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan terminal penumpang. Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM memiliki target 1 Paket yaitu Revitalisasi Terminal Tipe A Ciakar Sumedang.

c) Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kegiatan Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM BPTD Kelas I Jawa Barat :

- Revitalisasi fisik (perbaikan fasilitas ruang tunggu, area parkir, mushola, toilet, signage, jalur difabel);
- Digitalisasi layanan (informasi jadwal bus, CCTV, dan sistem tiket terintegrasi);
- Pemenuhan SPM sesuai PM 40 Tahun 2015 yang meliputi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan, kemudahan, dan kesetaraan.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Faktor atau potensi yang mempengaruhi Kegagalan Kegiatan Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM BPTD Kelas I Jawa Barat :

- Keterbatasan Anggaran Fisik, Tidak semua terminal dapat direvitalisasi dalam tahun berjalan;
- Keterlambatan Proses Lelang dan Konstruksi, Proses pengadaan dan pekerjaan konstruksi sering terkendala administrasi;
- Kendala Lahan dan Aset, Beberapa terminal masih dalam sengketa atau belum serah terima penuh ke pusat;
- Keterbatasan SDM Pengelola Terminal, Jumlah petugas belum memadai untuk implementasi pelayanan berbasis SPM.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM diketahui bahwa :

$$\textbf{Realisasi Kinerja} = \frac{\textbf{Jumlah TTA Ditingkatkan Pada Tahun } (n)}{\textbf{Jumlah TTA Ditingkatkan Yang Direncanakan}} \textbf{X 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Kegiatan Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{Capian Kinerja} = \frac{\textbf{1}}{\textbf{1}} \textbf{X 100\%}$$

Sehingga realisasi Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP sebesar 100%.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 yaitu Rp 15,000,000,000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 10.000.000.000 ,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 4.909.889.000,- atau mencapai 100% dari nilai pagu yang tersisa. Adapun kegiatan yang terlaksananya untuk mendukung kegiatan ini berupa :

1. Pekerjaan Struktur;
2. Pekerjaan Arsitektur;
3. Pekerjaan MEP;
4. Pekerjaan Meubelair dan Interior.

nomenklatur POK sebagai berikut: Revitalisasi Terminal Tipe A Ciakar Sumedang Tahap II (4638.CBP.031.051.A).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
   - Menyusun roadmap peningkatan SPM terminal secara bertahap dengan prioritas berdasarkan kondisi eksisting;
   - Mengusulkan tambahan anggaran revitalisasi terminal melalui DIPA tahun berikutnya;
   - Melakukan monitoring evaluasi capaian indikator SPM setiap triwulan;
   - Mengembangkan sistem penilaian SPM digital untuk menilai capaian layanan terminal secara objektif.

III.5.2 IKK 2.1.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ukuran pelayanan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, yang meliputi intensitas bus yang datang dan berangkat, keterpaduan layanan dengan moda lain, fasilitas, dan jenis layanan yang harus disediakan. Secara spesifik, SPM terminal tipe A mengukur pencapaian seperti intensitas kedatangan dan keberangkatan bus

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

   Realisasi kinerja Kegiatan Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM sebesar 10 (sepuluh) jika dibandingkan dengan target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 10 (sepuluh) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar IV. 4 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 24 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang (SPM);
- Peraturan Pemerintah (terbaru) tentang Standar Pelayanan Minimal (PP No. 2 Tahun 2018);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM 24 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Permenhub 40/2015).

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Monitoring dan Evaluasi serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal

Penumpang Angkutan Jalan. Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target 10 yaitu seluruh TTA di wilayah Jawa Barat

c) Faktor Keberhasilan
   - Kejelasan informasi: Ketersediaan informasi jadwal keberangkatan, rute, dan tarif secara akurat dan mudah diakses oleh penumpang;
   - Pengamanan dan kenyamanan: Adanya petugas yang siaga untuk memberikan pengamanan, pelayanan informasi, serta melayani dengan ramah (senyum, sapa, salam, sopan, santun);
   - Layanan penumpang berkebutuhan khusus: Tersedianya fasilitas dan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia;
   - Penanganan keluhan: Prosedur yang jelas dan responsif dalam menanggapi keluhan atau pengaduan dari penumpang.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
   - Kondisi fasilitas yang tidak terawat seperti ruang tunggu yang kotor, toilet yang tidak layak, atau kurangnya penerangan dapat menurunkan kualitas layanan;
   - Lokasi terminal yang sulit dijangkau oleh masyarakat karena tidak terintegrasi dengan moda transportasi lain akan menyebabkan penurunan minat pengguna;
   - Beberapa fasilitas mungkin tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga tidak memberikan manfaat optimal bagi penumpang;
   - Kurangnya akses atau fasilitas bagi penyandang disabilitas (seperti ramp atau toilet khusus) dapat menjadi potensi kegagalan dalam memenuhi standar pelayanan.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM diketahui bahwa :

$$\textbf{Realisasi Kinerja} = \frac{\textbf{Jumlah Realisasi Ops TTA Sesuai SPM Pada Tahun } (\boldsymbol{n})}{\textbf{Jumlah Ops TTA Sesuai SPM Yang Direncanakan}} \textbf{X } 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{Capian Kinerja} = \frac{\textbf{10}}{\textbf{10}} \textbf{X } 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM sebesar 100%.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM Tahun 2025 yaitu Rp 19.938.233.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 683.218.000 ,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 19.934.180.295,- atau mencapai 100% dari nilai pagu yang tersisa, dengan nomenklatur POK: Operasional Terminal Penumpang Tipe A dan Excellent Service Terminal Penumpang Tipe A (4638.CDP.040.051 dan 4638.CDP.040.052).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Melakukan perbaikan dan modernisasi fasilitas terminal yang sudah usang, seperti ruang tunggu, toilet, dan area keberangkatan/kedatangan, agar sesuai dengan SPM;

- Memastikan ketersediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas, seperti jalur khusus, toilet, dan kursi roda, agar terminal dapat melayani semua lapisan Masyarakat;
- Menerapkan jadwal pembersihan rutin dan intensif di seluruh area terminal, terutama di fasilitas umum seperti toilet dan ruang tunggu;
- Menambah dan memelihara CCTV, detektor logam, dan petugas keamanan untuk menjamin keamanan penumpang dan ketertiban operasional terminal.

III 5.3 IKK 2.1.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Total unit fasilitas penimbangan kendaraan bermotor (jembatan timbang) yang telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan, baik dari aspek sarana dan prasarana, sistem operasional, sumber daya manusia, maupun penerapan teknologi, sehingga memenuhi atau mendekati pemenuhan ketentuan SPM sesuai peraturan perundang-undangan dalam suatu periode tertentu.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

   Realisasi kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebesar 1 (satu) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 (satu) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar IV. 5 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan,

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target 1unit yaitu UPPKB Tomo.

c) Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kegiatan Operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM BPTD Kelas I Jawa Barat :

- Ketersediaan dan Kesiapan Infrastruktur (Fasilitas timbangan berfungsi baik (akurat, terkalibrasi, dan terpelihara, Peralatan pendukung seperti Weight in Motion (WIM), kamera pengawas, dan sistem pelaporan daring berfungsi optimal)
- Dukungan Anggaran dan Kebijakan (Alokasi dana APBN / DIPA mencukupi untuk operasional, perawatan, dan modernisasi fasilitas,Dukungan kebijakan BPTD dan Ditjen Hubdat dalam prioritas program pengendalian over dimension & over loading (ODOL).
- Kualitas SDM dan Manajemen Operasional (petugas UPPKB kompeten dan memiliki pelatihan sesuai standar, Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh BPTD dan Ditjen Hubdat);
- Integrasi Data dan Teknologi (Pemanfaatan sistem digital seperti Weighbridge Management System (WMS) atau Smart Weighbridge yang terhubung ke pusat data Kemenhub.)

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Faktor atau potensi yang mempengaruhi Kegagalan Kegiatan Toperasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM BPTD Kelas I Jawa Barat :

- Kerusakan atau Kalibrasi Timbangan Tidak Tepat Waktu (Fasilitas tidak bisa beroperasi sementara atau hasil penimbangan tidak valid)
- Keterbatasan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan (Menghambat perbaikan atau penggantian peralatan rusak)
- Kekurangan SDM dan Pergantian Personel yang Sering (Menurunkan konsistensi kualitas pelayanan);
- Gangguan Sistem atau Integrasi Data Online (Menyulitkan pelaporan real-time dan pemantauan pusat);
- Kendala Koordinasi Lintas Instansi (Kemenhub, Kepolisian, Pemerintah Daerah) Terhambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM diketahui bahwa :

$$\textbf{Realisasi Kinerja} = \frac{\textbf{Jumlah Peningkatan Layanan UPPKB Sesuai SPM Pada Tahun } (\boldsymbol{n})}{\textbf{Jumlah Peningkatan Layanan UPPKB Sesuai SPM Yang Direncanakan}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebesar 100%.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 yaitu Rp 1.249.400.000,-, dengan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 1.249.254.247,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) direhabilitasi (4639.CDP.076.051).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Modernisasi dan Digitalisasi Fasilitas Penimbangan (Mengembangkan sistem smart weighbridge berbasis IoT dan integrasi nasional (misalnya

melalui WMS online),Menambah alat timbang portabel di titik strategis jalur logistik utama;

- Peningkatan Kualitas SDM dan Supervisi (Pelatihan berkala untuk petugas UPPKB dan pengawas lapangan,Penegakan disiplin dan audit operasional secara rutin);
- Pemeliharaan dan Kalibrasi Berkala (Menetapkan jadwal kalibrasi nasional untuk menjaga akurasi,Membentuk tim teknis cepat tanggap untuk perbaikan peralatan);
- Penguatan Koordinasi dan Sinergi (Meningkatkan kerja sama antara BPTD, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan ODOL,Mendorong partisipasi operator logistik agar patuh terhadap regulasi berat kendaraan);
- Optimalisasi Anggaran dan Prioritas Program (Menetapkan prioritas fasilitas penimbangan utama untuk mendapat dukungan penuh APBN,Mendorong pembiayaan berbasis kinerja melalui indikator capaian SPM.

III.5.4 IKK 2.1.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM adalah banyaknya kali atau frekuensi layanan penimbangan kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh fasilitas penimbangan (UPPKB atau fasilitas tetap) dalam suatu periode (misalnya per tahun), yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Unsur-unsur Operasional sesuai SPM yakni : Alat penimbangan tertera (tera sah), Keakuratan / kesesuaian hasil penimbangan, prosedur operasional yang sesuai SOP, ketepatan waktu pelayanan, fasilitas pendukung yang memadai, pengaduan dan transparansi, pencatatan dan pelaporan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

   Realisasi kinerja Kegiatan Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM sebesar 6 (enam) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 6 (enam) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian

Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar IV. 6 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

h) Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

i) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan,

Berdasarkan Revisi II PK tahun 2025, kegiatan operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target 6 Lokasi yaitu UPPKB Balonggandu, UPPKB Losarang, UPPKB Cibaragalan, UPPKB Kemang, UPPKB Gentong, UPPKB Tomo.

j) Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kegiatan Operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM BPTD Kelas I Jawa Barat :

- Ketersediaan dan Kesiapan Infrastruktur (Fasilitas timbangan berfungsi baik (akurat, terkalibrasi, dan terpelihara, Peralatan pendukung seperti Weight in Motion (WIM), kamera pengawas, dan sistem pelaporan daring berfungsi optimal)
- Dukungan Anggaran dan Kebijakan (Alokasi dana APBN / DIPA mencukupi untuk operasional, perawatan, dan modernisasi fasilitas,Dukungan kebijakan BPTD dan Ditjen Hubdat dalam prioritas program pengendalian over dimension & over loading (ODOL).
- Kualitas SDM dan Manajemen Operasional (petugas UPPKB kompeten dan memiliki pelatihan sesuai standar, Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh BPTD dan Ditjen Hubdat);
- Integrasi Data dan Teknologi (Pemanfaatan sistem digital seperti Weighbridge Management System (WMS) atau Smart Weighbridge yang terhubung ke pusat data Kemenhub.)

k) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Faktor atau potensi yang mempengaruhi Kegagalan Kegiatan Toperasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM BPTD Kelas I Jawa Barat :

- Kerusakan atau Kalibrasi Timbangan Tidak Tepat Waktu (Fasilitas tidak bisa beroperasi sementara atau hasil penimbangan tidak valid)
- Keterbatasan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan (Menghambat perbaikan atau penggantian peralatan rusak)
- Kekurangan SDM dan Pergantian Personel yang Sering (Menurunkan konsistensi kualitas pelayanan);

- Gangguan Sistem atau Integrasi Data Online (Menyulitkan pelaporan real-time dan pemantauan pusat);
- Kendala Koordinasi Lintas Instansi (Kemenhub, Kepolisian, Pemerintah Daerah) Terhambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL.

l) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM diketahui bahwa :

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja = \frac{Jumlah\ Realisasi\ Ops\ UPPKB\ Sesuai\ SPM\ Pada\ Tahun\ (n)}{Jumlah\ Ops\ UPPKB\ Sesuai\ SPM\ Yang\ Direncanakan}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM sebesar 100%

m) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja = \frac{6}{6}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM sebesar 100%.

n) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Tahun 2025 yaitu Rp 7.838.222.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 1.747.533.000,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 7.837.899.956,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Operasional UPPKB (4638.CDP.077.052).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Modernisasi dan Digitalisasi Fasilitas Penimbangan (Mengembangkan sistem smart weighbridge berbasis IoT dan integrasi nasional (misalnya melalui WMS online),Menambah alat timbang portabel di titik strategis jalur logistik utama;
- Peningkatan Kualitas SDM dan Supervisi (Pelatihan berkala untuk petugas UPPKB dan pengawas lapangan,Penegakan disiplin dan audit operasional secara rutin);
- Pemeliharaan dan Kalibrasi Berkala (Menetapkan jadwal kalibrasi nasional untuk menjaga akurasi,Membentuk tim teknis cepat tanggap untuk perbaikan peralatan);
- Penguatan Koordinasi dan Sinergi (Meningkatkan kerja sama antara BPTD, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan ODOL,Mendorong partisipasi operator logistik agar patuh terhadap regulasi berat kendaraan);
- Optimalisasi Anggaran dan Prioritas Program (Menetapkan prioritas fasilitas penimbangan utama untuk mendapat dukungan penuh APBN,Mendorong pembiayaan berbasis kinerja melalui indikator capaian SPM.

III.5.5 IKK 2.1.5 Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ merupakan tugas bagian SDM dan Bidang LLAJ . Adapun kegiatan monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ yang dilaksanakan antara lain Evaluasi Beban Kerja Pegawai, pembinanaan dan motivasi pegawai, kegiatan pengendalian lalu lintas event khusus, pengawasan evaluasi MRLL, dan pengawasan evaluasi Andalalin.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ sebesar 7 (tujuh) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 7 (tujuh) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:

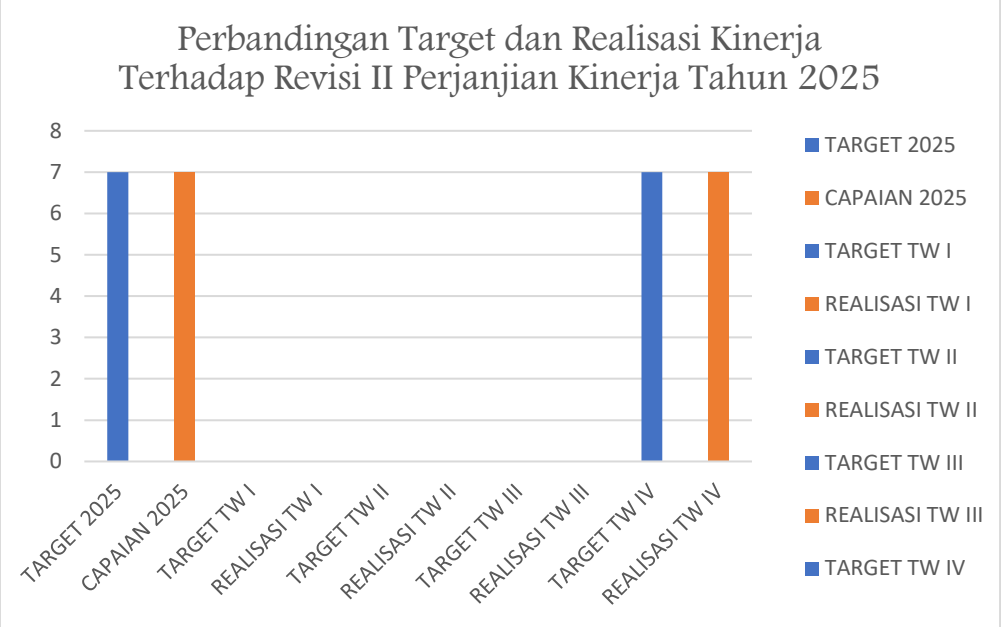

Gambar IV. 7 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- Permenhub RI Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan perubahannya (termasuk PM 46/2016 dan PM 11/2017 Permenhub RI Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- Permenhub RI Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat beserta perubahanya

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ memiliki target 7 (Kegiatan) yaitu

- Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus
- Pengawasan Evaluasi MRLL
- Pengawasan Evaluasi Andalalin
- Evaluasi Beban Kerja Pegawai
- Pembinaan dan Motivasi Pegawai

c) Faktor Keberhasilan

- Keberhasilan dimulai dengan penetapan tujuan monev yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART). Indikator kinerja utama (KPI) yang relevan harus ditetapkan untuk mengukur progres secara akurat.
- Proses monev harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain program atau kebijakan, bukan kegiatan yang dipaksakan dari luar.
- Alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang cukup sejak awal memastikan pelaksanaan monev dapat berjalan efektif.
- Kegiatan perencanaan dan persiapan dalam penyusunan Rencana Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2025 serta Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang matang
- Pelaporan penyusunan Rencana Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2025 serta Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 telah dilaksanakan tepat waktu kepada pimpinan
- Terdapat kerjasama dan koordinasi yang baik antara Bagian Lalu Lintas dan Pengawasan dengan Bidang Teknis di lingkungan BPTD Kelas I Jawa Barat dalam hal menyampaikan program kerja;

- Adanya dukungan dari pimpinan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan Penyusun Rencana Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2025 serta Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Pengumpulan data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau manipulatif akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Data yang terfragmentasi antar unit juga menghambat analisis yang menyeluruh.
- Proses monev sering kali dibarengi dengan beban administrasi yang tinggi dan birokratis. Hal ini dapat mengalihkan fokus petugas dari tugas pokok dan mengurangi efisiensi proses monev itu sendiri.
- Di beberapa daerah, masalah infrastruktur seperti akses jalan, jaringan internet, atau listrik yang tidak stabil dapat mengganggu proses pengumpulan data secara digital.
- Petugas yang tidak memiliki kompetensi dalam metodologi monev, pengolahan data, dan analisis akan menghasilkan laporan yang tidak mendalam dan tidak berguna untuk perbaikan

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ diketahui bahwa :

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja = \frac{Jumlah\ Realisasi\ Monev\ Pada\ Tahun\ (n)}{Jumlah\ Monev\ Yang\ Direncanakan}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja} = \frac{\mathbf{7}}{\mathbf{7}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok sebesar 0%. Justifikasi belum tercapainya kegiatan ini adalah adanya blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2.823.534.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 2.886.870.000,-. Sisa anggaran yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan monev dimaksud.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Ketata Usahaan Tahun 2025 yaitu Rp 768.256.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2.218.814.000,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 768.077.632,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana (4640.FAE.923.923.C) Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas (4640.FAE.923.923.D) Monitoring Pengendalian Lalu Lintas (4640.FAE.923.923.E) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Teknis Keselamatan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 4640.FAE.923.923.H)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) monev yang jelas dan konsisten di seluruh unit kerja. Hal ini memastikan proses monev berjalan terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan
- Hasil monev harus digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana aksi yang konkret dan mengukur progres perbaikan.
- Melibatkan seluruh unit kerja dalam proses monev. Kerja sama antarunit akan memastikan pemahaman yang komprehensif tentang kendala yang dihadapi dan pengambilan keputusan yang tepat
- Pelaksanaan monitoring,pengawasan, pemantauan, penanganan dan pengaturan terkait pengendalian lalu lintas pada masa event khusus 2025-2029
- Penyusunan dan pelaporan perlaksanaan dari hasil posko event khusus 2025-2029 dengan evaluasi dan analisis data sehinggga menghasilkan

rekomendasi teknis program kegiatan Posko event khusus 2025-2029 kepada pimpinan BPTD Kelas I Jawa Barat. Serta

- Penyampaian dan laporan hasil Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus BPTD Kelas I Jawa Barat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan

III.6 SK 2.2 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP

Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) 2.2 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

III.6.1 IKK 2.2.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, definisi operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) mencakup beberapa aspek utama Pengawasan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya SPM dalam kegiatan operasional angkutan tersebut

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

   Realisasi kinerja Kegiatan Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM sebesar 5 (lima) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 5 (lima) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar IV. 8 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011: Merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM serta Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target 5 yaitu operasional di 5 (lima) pelabuhan SDP

c) Faktor Keberhasilan

Pencapaian SPM merupakan tolok ukur utama keberhasilan operasional pelabuhan sungai dan danau. SPM mencakup berbagai aspek, termasuk keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan. Untuk mencapai SPM, pelabuhan harus mampu mengelola semua faktor di atas dengan baik.

Berikut adalah beberapa indikator kinerja pelabuhan yang relevan:

- Waktu yang dihabiskan kapal untuk menunggu pelayanan.
- Waktu yang dihabiskan untuk bongkar muat barang atau penumpang.
- Tingkat pemakaian dermaga: Efisiensi penggunaan dermaga.
- Kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Kurangnya pengawasan dan pembinaan: Minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah menyebabkan pengelolaan transportasi sungai dan danau menjadi kurang optimal.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM): Kurangnya jumlah tenaga kerja yang memadai atau kompetensi yang kurang mumpuni di pelabuhan dapat menghambat kelancaran operasional.
- Masalah ketenagakerjaan: Adanya masalah ketenagakerjaan, seperti mogok kerja atau konflik, dapat mengganggu jadwal operasional.
- Sistem dan prosedur yang tidak jelas: Ketidakjelasan dalam prosedur operasional dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pelayanan.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM diketahui bahwa:

$$\textbf{Realisasi Kinerja} = \frac{\textbf{Jumlah Realisasi Ops Sesuai SPM Pada Tahun } (\boldsymbol{n})}{\textbf{Jumlah Ops Sesuai SPM Yang Direncanakan}} \textbf{X } 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{Capian Kinerja} = \frac{5}{5} \textbf{X } 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM 100%.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Tahun 2025 yaitu Rp 1.405.673.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 92.758.000 sehingga anggaran yang tersisa yaitu Rp 1.312.915.000 realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 1.312.825.495,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (4638.CDP.045.051.)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Mengembangkan sistem informasi untuk memantau data operasional secara real-time, seperti data produksi, jumlah hari operasi, jumlah trip, dan jumlah penumpang.
- Menerapkan sistem pemesanan tiket digital untuk mempermudah proses pembelian tiket dan mengurangi praktik percaloan. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

- Menggunakan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna jasa, seperti sistem pengumuman digital atau aplikasi seluler yang terintegrasi.

III.8 SK 3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang Dan Barang

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3.1 diukur melalui 3 (Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

III.8.1 IKK 3.1.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan, pemantauan, dan penegakan terhadap pelaksanaan operasional angkutan AKAP, AJAP, dan Pariwisata agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, serta aspek keselamatan dan keamanan transportasi.

   Adapun Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata BPTD Kelas I Jawa Barat yang dilaksanakan pada kegiatan ini:

   - Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional Bus Pariwisata pada titik lokasi pariwisata dimasa libur panjang
   - Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP pada satuan pelayanan Terminal wilayah kerja BPTD
   - Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional AJAP pada titik lokasi Poll wilayah Bandung Raya dan Wilayah Jawa Barat (tentative)

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

   Realisasi kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata sebesar 3 (tiga) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3 (tiga) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar IV. 9 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek:
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Penyusun Rencana Program dan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target 3 (tiga) yaitu berupa;

- Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional Bus Pariwisata pada titik lokasi pariwisata dimasa libur panjang
- Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP pada satuan pelayanan Terminal wilayah kerja BPTD
- Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional AJAP pada titik lokasi Poll wilayah Bandung Raya dan Wilayah Jawa Barat (tentative)

c) Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata BPTD Kelas I Jawa Barat.

Berikut adalah faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan tersebut :

- SDM Pengawas Kompeten dan Disiplin – memiliki pengetahuan teknis dan integritas tinggi.
- Koordinasi dan Sinergi Baik – kerja sama efektif dengan Dishub, Kepolisian, dan instansi terkait.
- Data dan Sistem Pengawasan Terpadu – pemanfaatan teknologi untuk pemantauan izin dan kendaraan.
- Kepatuhan Operator Angkutan Tinggi – didukung pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan.
- Ketersediaan Sarana dan Anggaran Memadai – mendukung mobilitas dan intensitas pengawasan.
- Tindak Lanjut dan Pembinaan Efektif – setiap hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan pembinaan dan sanksi tegas.

- Dukungan Pimpinan dan Kebijakan yang Konsisten – memastikan keberlanjutan dan prioritas kegiatan pengawasan.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata BPTD Kelas I Jawa Barat, sebagaimana berikut :

- Keterbatasan SDM dan Sarana – jumlah petugas dan kendaraan operasional pengawasan tidak sebanding dengan luas wilayah.
- Koordinasi Lemah – antar instansi (BPTD, Dishub, Kepolisian) belum optimal.
- Data dan Informasi Tidak Terpadu – sulit memantau izin dan pelanggaran kendaraan secara real time.
- Kepatuhan Operator Rendah – masih banyak pelanggaran izin, trayek, dan kelaikan kendaraan.
- Kurangnya Pembinaan dan Sanksi Tegas – pengawasan belum diikuti dengan tindak lanjut efektif.
- Keterbatasan Anggaran Operasional – membatasi frekuensi dan jangkauan kegiatan lapangan.
- Pengaruh Faktor Eksternal – kondisi lalu lintas, cuaca, dan puncak arus mudik/liburan menyulitkan pengawasan.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata diketahui bahwa:

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja = \frac{Jml\ Realisasi\ Pengawasan\ Pada\ Tahun\ (n)}{Jml\ Pengawasan\ Yang\ Direncanakan}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{3}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata sebesar 100%.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata Tahun 2025 yaitu Rp 400.000.000,- dan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 399.996.334,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang (4640.FAE.923.923.I)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada truwulan IV dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata BPTD Kelas I Jawa Barat dengan melaksanakan 3 (tiga) rencana kinerja yaitu :

- Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional Bus Pariwisata pada titik lokasi pariwisata dimasa libur panjang
- Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP pada satuan pelayanan Terminal wilayah kerja BPTD
- Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional AJAP pada titik lokasi Poll wilayah Bandung Raya dan Wilayah Jawa Barat (tentative)

III.8.2 IKK 3.1.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang adalah tindakan pemeriksaan, pemantauan, dan penegakan terhadap kegiatan pengangkutan barang agar sesuai dengan izin, ketentuan teknis kendaraan, dan standar keselamatan lalu lintas.

Adapun Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang BPTD Kelas I Jawa Barat yang dilaksanakan pada kegiatan ini:

- Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada satuan pelayanan UPPKB
- Suport Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada titik lokasi rest area di toll wilayah Jawa Barat (Undangan terkait personil dan alat penunjang kegiiatan)
- Suport Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada ruas jalan arteri wilayah Jawa Barat (Undangan terkait personil dan alat penunjang kegiiatan)

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar 4 (empat) berupa :

1. Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada satuan pelayanan UPPKB (3 kegiatan)
2. Monitoring Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri (1 kegiatan)

jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 4 (empat) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

Gambar IV. 10 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Penyusun Rencana Program dan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target 4 (empat) yaitu berupa;

- Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada satuan pelayanan UPPKB (3 kegiatan)
- Monitoring Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri (1 kegiatan)

c) Faktor Keberhasilan

Faktor Keberhasilan Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang antara lain :

- SDM pengawas kompeten dan tegas dalam penerapan aturan.
- Koordinasi kuat antara BPTD, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan daerah.

- Ketersediaan sarana dan peralatan pengawasan (mobil patroli, timbangan portabel, alat ukur dimensi).
- Sistem data dan pemantauan digital untuk mendeteksi pelanggaran ODOL.
- Kepatuhan dan kesadaran perusahaan angkutan terhadap aturan keselamatan.
- Dukungan anggaran dan kebijakan pimpinan yang berkesinambungan.
- Tindak lanjut hasil pengawasan yang konsisten (pembinaan dan sanksi tegas).
- Pemanfaatan sistem digital untuk registrasi dan verifikasi hasil produksi (SRUT).
- Pembinaan berkelanjutan bagi bengkel karoseri untuk meningkatkan mutu dan keselamatan kendaraan

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Faktor Kegagalan Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang :

- Kurangnya SDM dan sarana pengawasan di lapangan.
- Koordinasi antar instansi lemah dalam penegakan aturan ODOL.
- Minimnya anggaran operasional untuk kegiatan rutin dan penindakan.
- Data perizinan dan kendaraan tidak terintegrasi.
- Rendahnya kepatuhan operator dan sopir terhadap ketentuan muatan dan izin.
- Penegakan hukum belum konsisten atau berkelanjutan.
- Pengawasan tidak merata di seluruh wilayah dan waktu operasi.
- Data dan sistem registrasi bengkel belum terintegrasi.
- Kepatuhan bengkel rendah terhadap standar teknis dan administrasi.
- Pengawasan tidak rutin

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang diketahui bahwa:

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja = \frac{Jml\ Realisasi\ Pengawasan\ Pada\ Tahun\ (n)}{Jml\ Pengawasan\ Yang\ Direncanakan}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Pengawasan Operasional Angkutan Barang sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja = \frac{4}{4}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Pengawasan Operasional Angkutan Barang sebesar 100%.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Pengawasan Operasional Angkutan Barang Tahun 2025 yaitu Rp 800.000.000,- dan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 799.995.375,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK:

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Over Dimension Over Loading (4640.FAE.923.923.G)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada truwulan IV dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang BPTD Kelas I Jawa Barat, rencana kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan:

- Meningkatkan kompetensi dan jumlah petugas pengawas.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan dan pelaporan (sistem perizinan online).

- Memperkuat koordinasi lintas instansi (BPTD, Kepolisian, Dishub, dan asosiasi angkutan).
- Menambah sarana dan anggaran operasional pengawasan.
- Melakukan pembinaan rutin dan sosialisasi kepada bengkel karoseri.
- Menerapkan sanksi tegas dan konsisten bagi pelanggaran ODOL dan izin.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan.

IIIs.8.4 IKK 3.1.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan adalah serangkaian proses perencanaan, pembangunan, penyediaan peralatan, pengujian, serta pengoperasian fasilitas penimbangan kendaraan bermotor di jalan yang bertujuan untuk mendukung pengawasan dan pengendalian muatan kendaraan angkutan, pencegahan Over Dimension dan Over Loading (ODOL), serta peningkatan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

   Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada triwulan IV dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung dengan melaksanakan 1 (satu) rencana kinerja yaitu Melaksanakan kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan.

   Realisasi Kinerja kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan sebesar 1 (satu), jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 (satu) maka capaian kinerja mencapai 100%. (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

Gambar IV. 11 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan memiliki target 1 (satu) unit UPPKB.

c) Faktor Keberhasilan

Faktor Keberhasilan kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan

- Fasilitas penimbangan dibangun sesuai standar teknis dan laik fungsi.
- Ketersediaan peralatan pendukung (IT, CCTV, WIM, sistem pencatatan data).
- Lokasi fasilitas strategis dan mudah diakses oleh kendaraan angkutan barang.
- Petugas penimbangan memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai.
- Pemeliharaan rutin fasilitas dan peralatan agar akurasi penimbangan terjaga.
- Ketersediaan anggaran operasional dan perawatan.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Faktor Kegagalan kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan

- Fasilitas penimbangan tidak memenuhi standar teknis atau tidak laik fungsi.
- Kerusakan alat timbang dan minimnya pemeliharaan.
- Lokasi fasilitas tidak strategis sehingga mudah dihindari kendaraan angkutan.
- Kurangnya jumlah dan kompetensi petugas penimbangan.
- Minimnya pelatihan dan sertifikasi teknis
- Pengawasan tidak rutin atau tidak menyeluruh.
- Kurangnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pelanggaran.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan

diketahui bahwa:

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja} = \frac{\boldsymbol{Jml\ Realisasi\ Pengawasan\ Pada\ Tahun\ (n)}}{\boldsymbol{Jml\ Pengawasan\ Yang\ Direncanakan}} \boldsymbol{X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja = \frac{1}{1} X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan sebesar 100%.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan Tahun 2025 yaitu Rp 1.098.396.000,- dan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 1.096.081.404,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Pembangunan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Lanjutan (4639.CBP.076.051)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun rencana peningkatan di kinerja pada truwulan IV dalam pelaksanaan Kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan dengan Melakukan pembangunan dan modernisasi fasilitas penimbangan kendaraan bermotor sesuai standar teknis, termasuk pemanfaatan teknologi penimbangan modern (Weigh in Motion/WIM) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.

III.9 SK 3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active Dan Passive Safety

Dalam sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indicator kinerja kegiatan yaitu :

III.9.1 IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman merupakan proses evaluasi untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar keselamatan dan regulasi yang berlaku, serta sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

   Realisasi Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar 1 (satu), jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1(satu) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

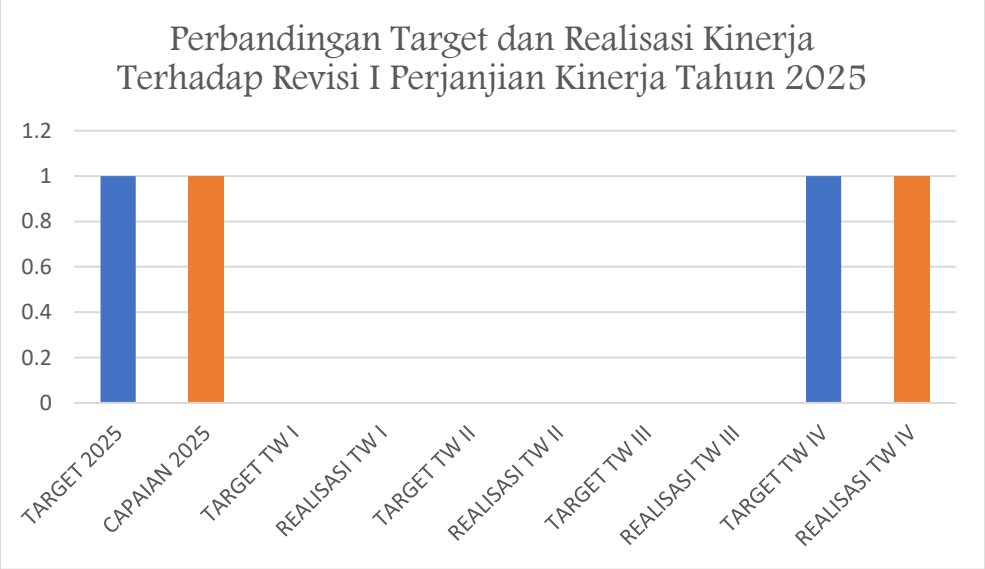

Gambar IV. 12 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan;
- Surat Himbauan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/14/DRJD/2020 tentang Himbauan Pemasangan Bumper Belakang pada Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Barang Bak Muatan;
- Surat Himbauan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/6/DRJD/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan.

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk memastikan kesesuaian desain dan peruntukan. Proses pengujian tipe dan rancang bangun kendaraan bermotor memerlukan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

c) Faktor Keberhasilan

- Pemenuhan regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Penguji harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan fisik dan evaluasi rancang bangun;
- Dokumentasi yang lengkap dan akurat diperlukan untuk proses pemeriksaan dan sertifikasi:
- Kolaborasi dengan regulator atau kerjasama yang baik antara industri otomotif dan regulator memperlancar proses pengujian dan sertifikasi.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

1. Ketidaksesuaian dengan regulasi atau konstruksi kendaraan tidak memenuhi standar dan regulasi yang berlaku:

2. Kompetensi Penguji yang tidak memadai yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan:

3. Kurangnya dokumentasi teknis yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat proses pemeriksaan dan sertifikasi.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman diketahui bahwa:

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja = \frac{Jml\ Realisasi\ Peeriksaan\ Pada\ Tahun\ (n)}{Jml\ Peeriksaan\ Yang\ Direncanakan} X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja = \frac{1}{1} X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja kinerja Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman sebesar 100%.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait kinerja Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 yaitu Rp 583.900.000,- dan Terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 571.458.000,- realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 4.147.228,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan (4640.FAE.923.923.F)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun rencana peningkatan di kinerja pada truwulan IV adalah sebagai berikut :

- Menganalisis kinerja saat ini untuk mengidentifikasi kekukarangan agar dapat segera di perbaiki
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya (SDM) dengan pengembangan kompetensi, ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan bimbingan teknis, agar mampu melaksanakan tugas dengan baik
- Memonitoring dan Evaluasi kinerja secara terus - menerus untuk meningkatkan pencapaian di masa yang akan dating

III.9.2 IKK 3.2.2 Jumlah Alat uji yang telah dikalibrasi

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Uji kalibrasi alat uji berkala adalah proses verifikasi dan penyesuaian alat uji untuk memastikan bahwa alat tersebut memberikan hasil pengukuran yang akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

   Realisasi Kinerja Kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar 2 (dua), jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 (dua) maka capaian kinerja mencapai 100%

   (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

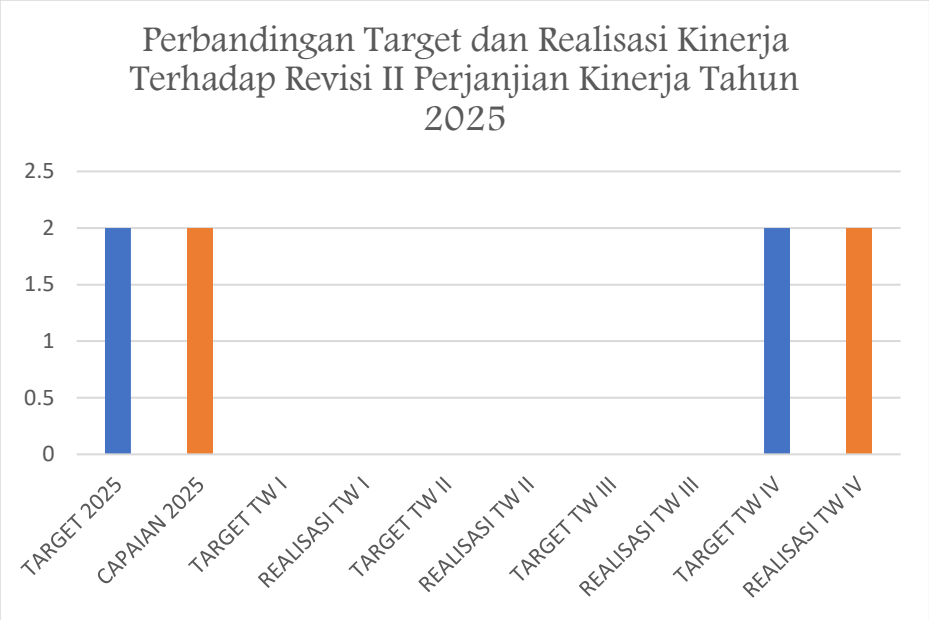

Gambar IV. 13 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

   h) Dasar Hukum

   - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan;
- Surat Himbauan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/6/DRJD/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan;
- Surat Himbauan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/14/DRJD/2020 tentang Himbauan Pemasangan Bumper Belakang pada Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Barang Bak Muatan.

i) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
- Permohonan Kalibrasi menentukan jadwal pelaksanaan kalibrasi;
- Persiapan Alat memastikan alat uji dalam kondisi baik untuk kalibrasi;
- Pelaksanaan Kalibrasi melakukan kalibrasi dengan membandingkan hasil pengukuran alat uji terhadap standar referensi;
- Evaluasi Hasil: menganalisis hasil kalibrasi untuk menentukan kesesuaian alat uji dengan standar.

j) Faktor Keberhasilan

- Kurangnya pemeliharaan alat dapat mengalami penurunan akurasi;
- Kesalahan prosedur kalibrasi yang tidak diikuti dengan benar dapat menyebabkan hasil kalibrasi tidak valid;
- Kerusakan alat uji dapat menyebabkan kegagalan kalibrasi;

k) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Kurangnya pemeliharaan alat dapat mengalami penurunan akurasi;
- Kesalahan prosedur kalibrasi yang tidak diikuti dengan benar dapat menyebabkan hasil kalibrasi tidak valid;
- Kerusakan alat uji dapat menyebabkan kegagalan kalibrasi;

l) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Jumlah Kegiatan Kalibrasi diketahui bahwa:

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja = \frac{Jml\ Realisasi\ Kalibrasi\ Pada\ Tahun\ (n)}{Jml\ Kalibrasi\ Yang\ Direncanakan}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Kegiatan kalibrasi sebesar 100%

m) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja = \frac{2}{2}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja kinerja Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman sebesar 100%. Justifikasi kegiatan ini termasuk dalam blokir efisiensi anggaran pada awal tahun 2025

n) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait kinerja Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 yaitu Rp 583.900.000,- dan Terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 571.458.000,- realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 8.294.455,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan (4640.FAE.923.923.F)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun rencana peningkatan di kinerja pada truwulan IV adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja untuk meningkatkan produktivitas;
- Mengembangkan Inovasi;
- Mengurangi resiko Kesalahan dan kecelakaan yang dapat terjadi akibat alat uji kalibrasi yang tidak akurat.

III.10 SK 3.3 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan

Dalam sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indicator kinerja kegiatan yaitu :

III.10.1 IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan, membangun, memasang, dan/atau mengoperasikan perlengkapan jalan (seperti rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, pagar pengaman, dan sebagainya) sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang jalan dan lalu lintas.

Adapaun Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis merupakan kegiatan operasional yang meliputi menyediakan, membangun, dan/atau mengoperasikan perlengkapan jalan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis BPTD Kelas II Jawa Barat sebesar 22 (dua puluh dua), jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 22 (dua puluh dua) maka capaian kinerja mencapai 100%

(Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

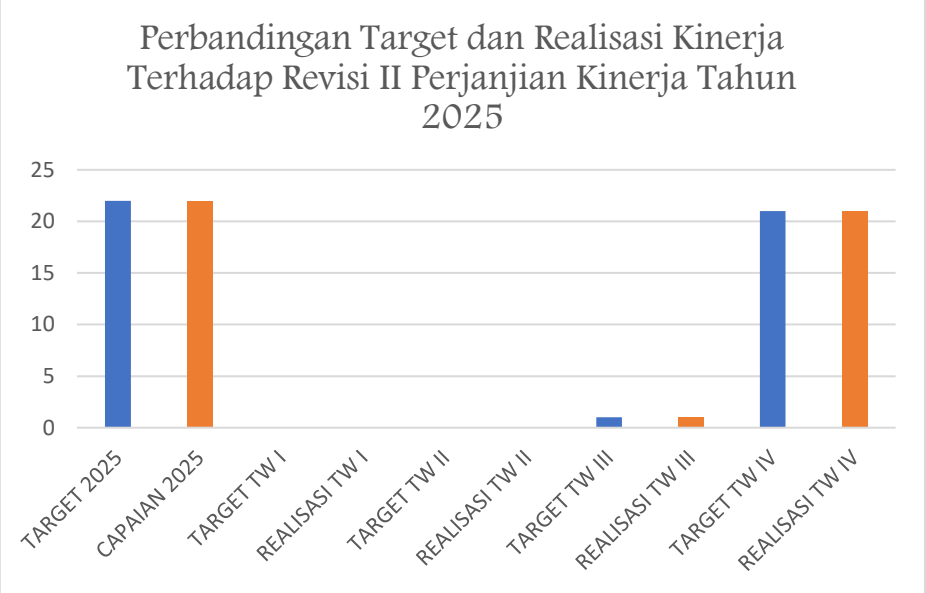

Gambar IV. 14 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- SK Dirjen Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Alat Penerangan Jalan
- PM Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan
- PM Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
- PM Nomor 49 tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- PM Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
- PM nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan

- PERDIRJEN HUBDAT NOMOR 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis marka Jalan
- KM PUPR Nomor 1688 Tahun 2022 tentang Jalan Nasional

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Penyusun Rencana Program dan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target 23 (dua puluh tiga) yaitu menyediakan, membangun, dan/atau mengoperasikan perlengkapan jalan.

c) Faktor Keberhasilan

Faktor Keberhasilan Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis

- SDM pengawas kompeten dan tegas dalam penerapan aturan.
- Koordinasi kuat antar Instansi dan Stakeholder.
- Ketersediaan sarana dan peralatan pengawasan.
- Kepatuhan dan kesadaran perusahaan angkutan terhadap aturan keselamatan.
- Dukungan anggaran dan kebijakan pimpinan yang berkesinambungan.
- Tindak lanjut hasil pengawasan yang konsisten (pembinaan dan sanksi tegas).

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Faktor Kegagalan Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis :

- Kurangnya SDM dan sarana pengawasan di lapangan.
- Kurangnya koordinasi antar instansi dan stakeholder.
- Minimnya anggaran operasional untuk kegiatan rutin dan pengawasan.

- Data yang tidak terintegrasi.
- Pengawasan tidak merata di seluruh wilayah dan waktu operasi.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Jumlah Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis diketahui bahwa:

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja = \frac{Jml\ Realisasi\ Peng\ Faskes\ Pada\ Tahun\ (n)}{Jml\ Peng\ Faskes\ Yang\ Direncanakan}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja = \frac{22}{22}\ X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebesar 100%.

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 yaitu Rp 22.325.722.000,- dan Terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 3.834.872.000,- realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 22.180.792.545,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan prioritas nasional (4639.RAC.053.051) dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (4639.RCC.212.051)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada truwulan IV adalah sebagai berikut :

- Perencanaan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan mupun Pemeliharaan Perlengkapan Jalan direncanakan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan hasil SID dan permohonan dari daerah.
- Pelaksanaan pekerjaan terrealisasi sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan tersebut
- pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan maupun pemeliharaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis.
- Pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- Melaksanakan revisi target perjanjian kinerja seiring dibukanya blokir efisiensi anggaran

III.8.6 IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah titik atau ruas Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) yang telah dilakukan tindakan penanganan melalui intervensi teknis dan/atau manajerial sesuai dengan pedoman dan standar keselamatan jalan yang berlaku, dengan tujuan menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman sebesar 1 (satu), jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 (satu) maka capaian kinerja mencapai 100%

(Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

Gambar IV. 15 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-undang ini mengatur perlengkapan jalan sebagai salah satu prasarana transportasi.
- Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Peraturan ini mendefinisikan jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya.
- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Penyusun Rencana Program dan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.Perlengkapan Jalan BPTD

Kelas I Jawa Barat memiliki target 1 (satu) yaitu berupa kegiatan Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakan.

c) Faktor Keberhasilan

- Tersedianya data kecelakaan lalu lintas yang valid, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar penetapan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK).
- Pelaksanaan intervensi penanganan LRK sesuai dengan pedoman dan standar keselamatan jalan yang berlaku.
- Tersedianya anggaran yang memadai serta perlengkapan jalan dan sarana pendukung keselamatan yang sesuai standar.
- Adanya komitmen pimpinan daerah dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan intervensi keselamatan.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Keterbatasan kualitas data menyebabkan kesalahan penetapan lokasi prioritas penanganan.
- Tidak mencukupinya anggaran menghambat pelaksanaan intervensi secara menyeluruh dan berkelanjutan
- Kurangnya sinergi menyebabkan keterlambatan atau ketidaktepatan pelaksanaan penanganan

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman diketahui bahwa:

$$\boldsymbol{Realisasi\ Kinerja} = \frac{\boldsymbol{Jml\ Realisasi\ Penanganan\ Pada\ Tahun\ (n)}}{\boldsymbol{Jml\ Penanganan\ Yang\ Direncanakan}} \boldsymbol{X\ 100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar 100%

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Capian\ Kinerja} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100\%}$$

Sehingga realisasi kinerja pengawasan Evaluasi pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar 100%. Justifikasi kegiatan ini termasuk dalam blokir efisiensi anggaran pada awal tahun 2025 dan baru dibuka blokir efisiensi anggaran pada bulan September, saat ini sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan pemeliharaan

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 yaitu Rp 1.124.018.000,- realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 1.123.872.004,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (4639.RAC.053.053)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Memperkuat pengumpulan, validasi, dan integrasi data kecelakaan lalu lintas dari berbagai sumber sebagai dasar penetapan prioritas Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK).
- Menyelaraskan perencanaan penanganan LRK dengan ketersediaan anggaran serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat risiko dan dampak kecelakaan
- Memperkuat sinergi antara Dinas Perhubungan, penyelenggara jalan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanganan LRK.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas intervensi LRK, termasuk pengukuran penurunan angka dan tingkat keparahan kecelakaan.

III.11 SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

Untuk Sasaran Kegiatan 4 terdapat 7 Indikantor Kinerja Kegiatan yaitu :

III.11.1 IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Perencanaan pembangunan adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu Penyusunan RKKL dan Program Pagu Kebutuhan,

Penyusunan RKKL dan Program Pagu Indikatif, Penyusunan RKKL dan Program Pagu Alokasi dan Penyususnan Dokumen Renstra.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar 1 (satu) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 (Satu) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

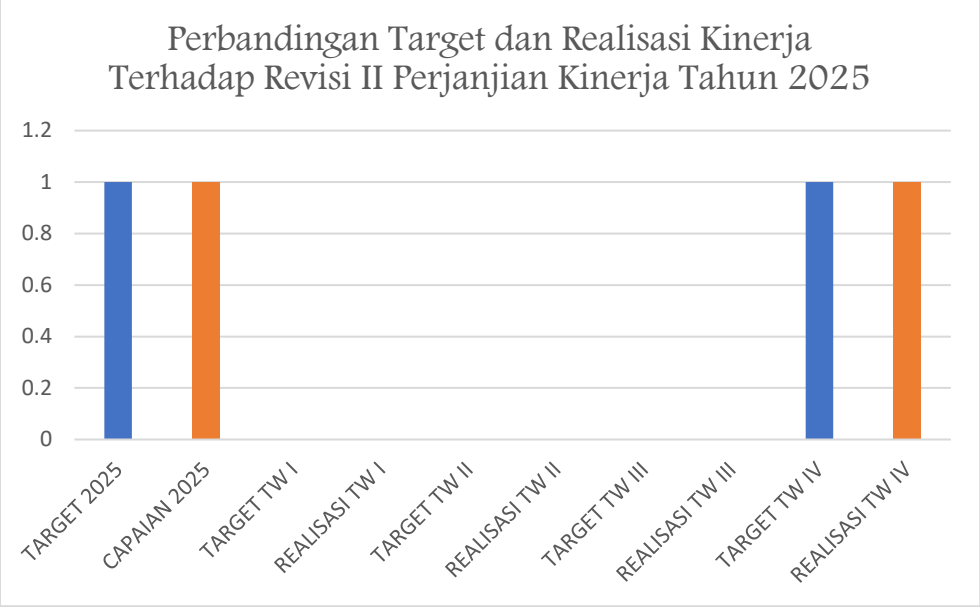

Gambar IV. 16 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 186 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 245 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 186 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, serta perubahanya.

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Penyusun Rencana Program dan Anggaran.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target 1 yaitu Penyusunan RKKL dan Program Pagu Kebutuhan, Penyusunan RKKL dan Program Pagu Indikatif, Penyusunan RKKL dan Program Pagu Alokasi dan Penyususnan Dokumen Renstra

c) Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat :

- Kegiatan perencanaan dan pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu
- Terdapat kerjasama dan koordinasi yang baik antara Bagian Tata Usaha dengan Bidang Teknis di lingkungan BPTD Kelas I Jawa Barat dalam hal menyampaikan program kerja;
- Adanya dukungan dari pimpinan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran yang ada di lingkungan BPTD Kelas I Jawa Barat

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Faktor atau potensi yang mempengaruhi Kegagalan Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat :
- Kurangnya pemahaman konsep perencanaan juga dapat menghambat pelaksanaan rencana
- Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kegagalan dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif kepada seluruh pihak yang terlibat dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan dalam pelaksanaan perencanaan
- Motivasi yang rendah dari tim pelaksana dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas pelaksanaan perencanaan

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%)

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Pada Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target sebesar 1. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian = (Realisasi Target/ Rencana Target)*100%

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Ketata Usahaan Tahun 2025 yaitu Rp 2.886.870.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2.823.534.000,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 12.666.804,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan (4640.FAE.923.923.A).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada triwulan IV adalah sebagai berikut :

- Menginventarisir kebutuhan minimal masing – masing Bidang dan Bagian untuk mengantisipasi penurunan pagu alokasi;
- Berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan Seditjen Perhubungan Darat terkait renstra Ditjen Perhubungan Darat

III.11.2 IKK 4.2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Secara sederhana, SAKIP adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mengelola dan melaporkan kinerjanya secara akuntabel dan transparan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu Koordinasi dan pengumpulan data real atau bahan

Penyusunan dokumen SAKIP antara lain Perjanjian Kinerja, Renaksi, Monitoring Renaksi, LMCK, LKIP dan lain sebagainya.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) senilai 82,5 jika dibandingkan dengan target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 senilai 82,5 maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%)

Gambar IV. 17 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Evaluasi dan Pelaporan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) memiliki target senilai 82,5 yaitu Penyusunan Dokumen LKIP tahun 2025 yang mana proses penyusunan dimulai dari awal tahun dengan membuat dokumen dokumen pendukungnya seperti Perjanjian Kinerja, Renaksi, Monitoring Renaksi, LMCK dan lain sebagainya

c) Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP):

- Perencanaan kinerja berkualitas meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang jelas, terukur, dan sesuai dengan tujuan nasional. Penilaian kinerja juga harus didasarkan pada indikator yang relevan dan realistis;
- Pengukuran kinerja yang akurat dan konsisten serta pelaporan yang jujur dan transparan kepada pemangku kepentingan;
- Pimpinan instansi yang memiliki komitmen kuat terhadap SAKIP akan mendorong kinerja organisasi menjadi lebih baik dan akuntabel.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Faktor atau potensi yang mempengaruhi Kegagalan Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP):

- Kurangnya sosialisasi kebijakan akuntabilitas kinerja kepada seluruh pegawai yang menyebabkan pemahaman yang lemah dan implementasi yang tidak merata;
- Belum terintegrasinya SAKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran menyebabkan ketidakharmonisan dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kinerja;
- Motivasi dan komitmen yang rendah dari pimpinan.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) sebesar 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%)

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) memiliki target senilai 82,5, yang mana target ini akan direlaisasikan pada Triwulan IV atau akhir tahun. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian = (Realisasi Target/ Rencana Target)*100%

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) Tahun 2025 yaitu Rp 2.886.870.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2.823.534.000,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 12.666.804,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan (4640.FAE.923.923.A).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan dimaksud belum terealisasi dikarenakan rencana realisasi ada pada triwulan IV adapun upaya peningkatan yang merupakan bagian proses menyelesaikana target kinerja adalah sebagai berikut :

- Menyusun dokumen-dokumen pendukung LKIP sesuai dengan tahapanya sehingga target kinerja tercapai pada Triwulan IV;
- Berkoordinasi dengan Bidang Teknis dilingkungan BPTD Kelas I Jawa Barat sehingga monitoring kinerja dapat sesuai dengan rencana.

IIIs.11.3 IKK 4.3 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis merupakan sasaran/tujuan kinerja yang fokus pada upaya memperbaiki kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran oleh BPTD Kelas I Jawa Barat, agar anggaran dapat terserap optimal dan memberi hasil sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Rekonsiliasi Semester, Laporan Sistem Akuntasi Instansi (SAI), Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan dan lainnya).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

   Realisasi kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis senilai 95% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 95% maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%)

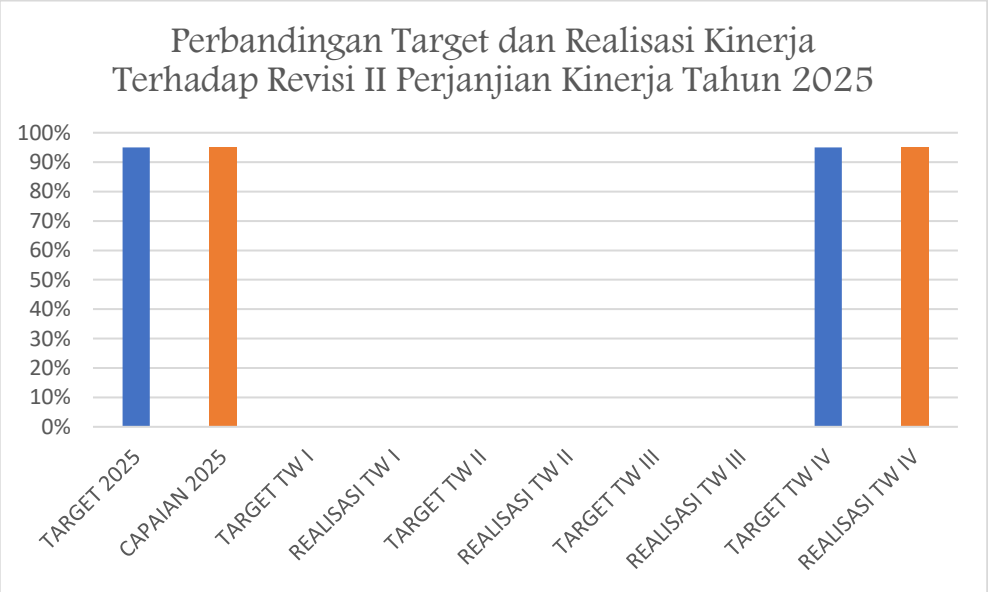

Gambar IV. 18 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Instruksi Menteri perhubungan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran melalui Sistem e-Monitoring dan Reporting di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 245 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 186 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, serta perubahanya

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Pengelolaan Urusan Keuangan.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target senilai 95% yaitu Rekonsiliasi Semester, Laporan Sistem Akuntasi Instansi (SAI), Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan dan lainnya).

c) Faktor Keberhasilan

- Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)
- Penyusunan RKA yang realistis, terukur, dan sesuai prioritas.
- Sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan pagu anggaran.
- Ketepatan alokasi anggaran sesuai program dan kegiatan prioritas BPTD.
- Pemanfaatan data hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk perbaikan perencanaan.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun sehingga kualitas output menurun.
- Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa.
- Hambatan administrasi pada proses pencairan (SPM/SP2D) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis sebesar 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis memiliki target senilai 95%, yang mana target ini telah direalisasikan senilai 95% Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian = (Realisasi Target/ Rencana Target)*100%

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis Tahun 2025 yaitu Rp 7.059.954.000,- dan terdapat blokir efisiensi sebesar Rp. 2.025.244.000 serta realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 2.517.306.096,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Operasional dan Pemeliharaan Kantor (4670.EBA.994.002)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada truwulan IV adalah sebagai berikut :

- Menginventarisir kebutuhan minimal masing – masing Bidang dan Bagian untuk mengantisipasi penurunan/penambahan pagu anggaran TA.2025;
- Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Seditjen Perhubungan Darat terkait pergeseran anggaran/Realokasi anggaran/Relaksasi Buka Blokir di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
- Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan prognosa yang telah ditetapkan pada TA.2025;

III.11.4 IKK 4.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) merupakan saran yang diberikan oleh auditor kepada pihak yang diaudit, berdasarkan hasil temuan audit. Adapun Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) yang telah ditindak lanjuti yaitu 1 (Satu) Berita Acara Rekomendasi yang didalamnya memuat 25 (Dua Puluh Lima) rekomendasi audit/pemeriksaan tahun 2024

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) senilai 60% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seNILAI 60% maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

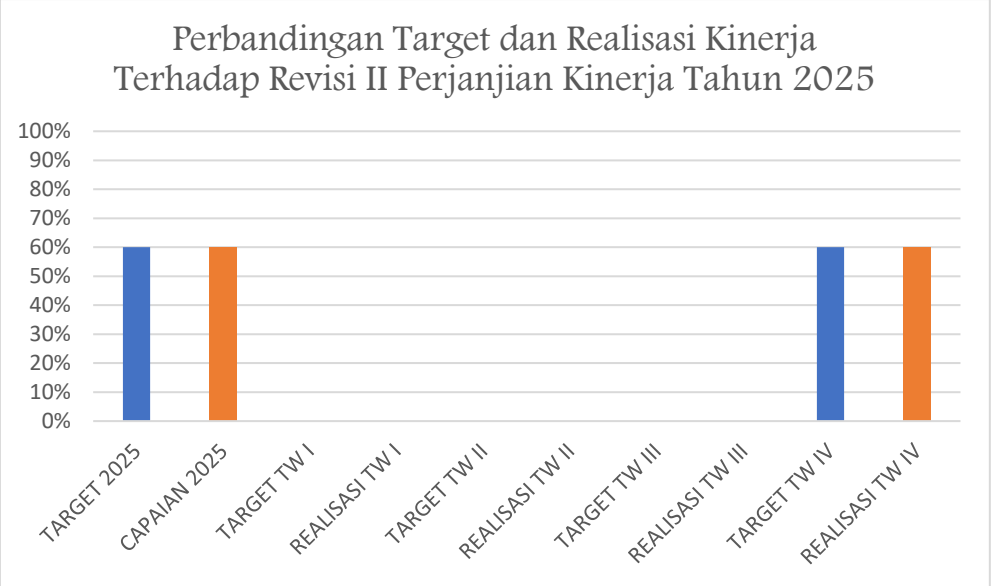

Gambar IV. 19 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Peraturan Perundangan terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah fungsi evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses memiliki target 1 yaitu tindak lanjut rekomendasi audit/pemeriksaan

c) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit biasanya dipengaruhi oleh kombinasi komitmen manajemen, koordinasi antarunit, dan pemantauan yang efektif. Berikut adalah poin-poin utama yang sering dijadikan acuan, terutama di instansi pemerintah, yaitu:

- Komitmen pimpinan;
- Pemahaman yang jelas terhadap temuan;
- Rencana aksi (action plan) yang terukur;
- Koordinasi dan Kolaborasi antarunit
- Pemanfaatan sistem pemantauan;
- Kompetensi dan kapasitas SDM;

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Faktor atau potensi yang mempengaruhi Kegagalan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses :

- Kurangnya komitmen manajemen, pimpinan atau pihak terkait tidak memberi prioritas pada rekomendasi;
- Sumber daya terbatas, kekurangan dana, tenaga kerja, atau waktu untuk melaksanakan tindak lanjut;
- Koordinasi yang lemah, unit kerja terkait tidak memiliki alur komunikasi yang jelas;
- Pemahaman yang kurang, pihak pelaksana tidak memahami maksud atau detail rekomendasi;
- Proses dan prosedur tidak memadai, SOP tidak mendukung pelaksanaan rekomendasi dengan efektif;
- Resistensi perubahan, budaya kerja atau individu yang menolak perbaikan;
- Perubahan kebijakan/regulasi, rekomendasi tidak relevan lagi atau harus disesuaikan;
- Tidak ada sistem monitoring yang kuat, tindak lanjut terpantau secara berkala.

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses sebesar 100% = (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%)

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Pada Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses memiliki target dengan persentase sebesar 60%, yang mana target ini telah direalisasikan berupa surat tindak lanjut rekomendasi Opini BPK sebanyak (Satu). Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian = (Realisasi Target/ Rencana Target)*100%

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Ketata Usahaan Tahun 2025 yaitu Rp 2.886.870.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2.823.534.000,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 12.667.200,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan (4640.FAE.923.923.A).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Memperkuat komitmen pimpinan instansi;
- Membentuk tim khusus tindak lanjut;
- Meningkatkan koordinasi antarunit kerja;
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi;
- Memberikan pelatihan dan sosialisasi;
- Menetapkan sanksi dan insentif;
- Meningkatkan pengawasan internal.

III.11.5 IKK 4.6 Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) merupakan kegiatan peningkatan integitas bagi unit kerja maupun satuan pelayanan dilingkungan BPTD Kelas I Jawa Barat. Adapun Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) Yaitu usulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

   Realisasi Kegiatan mendukung Penerapan Zona Integritas (ZI) yang sudah diselesaikan BPTD Kelas I Jawa Barat senilai 80 yang disesuaikan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 senilai 80 maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%)

Gambar IV. 20 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

Regulasi terkait Zona Integritas (ZI) mencakup Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB), dengan Mahkamah Agung mahkamahagung.go.id menyebutkan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024 sebagai yang terbaru, menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan ini menetapkan tahapan dan kriteria untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu Tugas dan Fungsi BPTD adalah Pengelolaan Urusan Keuangan yang didalamnya termasuk kegiatan integritas unit kerja maupun perorangan

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan dimaksud memiliki 1 (1) Target yaitu pengusulan ZI, atau WBK atau WBBM

c) Faktor Keberhasilan

- Komitmen yang kuat dari pimpinan adalah faktor penentu karena pemimpin harus menjadi *role model* dan mendorong perubahan di seluruh jajaran.
- Pembentukan tim kerja yang efektif dan memiliki rencana kerja yang jelas untuk mengawal proses pembangunan ZI.
- Pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Penataan tatalaksana yang tidak efektif
- Lemahnya pengawasan internal
- Kurangnya transparansi informasi

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Pada Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) memiliki target senilai 80 , yang mana target ini telah direalisasikan senilai 80 Untuk

menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja tersebut digunakan rumus sebagai berikut:
(Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

f) Perhitungan Capaian Kinerja
Pada Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) memiliki target senilai 80, yang mana target ini telah direalisasikan senilai 80 Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja tersebut digunakan rumus sebagai berikut:
(Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
Adapun anggaran terkait Kegiatan Ketata Usahaan Tahun 2025 yaitu Rp 2.886.870.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2.823.534.000,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 12.666.804,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan (4640.FAE.923.923.A).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- Manajemen perubahan
- Tingkatkan sistem manajemen SDM yang berbasis meritokrasi, dari rekrutmen hingga promosi.
- Lakukan evaluasi kinerja secara berkala dan obyektif.

III.11.6 IKK 4.7 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPTD Kelas I Jawa Barat merupakan suatu sistem pengaturan dan proses untuk memastikan pengadaan (pembelian) barang dan jasa, baik di sektor pemerintah maupun swasta, dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah diselesaikan BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar 3 (Tiga) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3 (Tiga) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

Gambar IV. 21 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

Dasar hukum utama untuk pengelolaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dan disesuaikan dengan perubahan terbaru seperti Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Perpres ini mengatur seluruh proses mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan, dan diperkuat dengan peraturan turunan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu Tugas dan Fungsi BPTD adalah Pengelolaan Urusan Keuangan yang didalamnya termasuk kegiatan tata kelola barang dan jasa

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Pengelolaan Aset BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki 3 (Tiga) Target yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Non Teknis

c) Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini antara lain : Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen, Sumber Daya Manusia yang kompeten, dan Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran yang sebanding dengan manfaat yang diharapkan memastikan optimalisasi.

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Adapun potensi kegagalan dalam kegiatan ini antara lain : Tidak terencana secara jelas sehingga tujuan tidak terdefinisi dan strategi yang tidak matang, Kurangnya pengalaman dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia, mengintegrasikan operasi, dan mengkoordinasikan kegiatan tata kelola barang dan jasa, dan anggaran yang tidak memadai sehingga kekurangan dana untuk menunjang kegiatan pengadaan, yang berisiko menyebabkan penundaan, pengurangan spesifikasi, atau bahkan kegagalan mencapai sasaran

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah diselesaikan BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar 100 % (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Pada Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPTD Kelas I Jawa Barat memiliki target sebesar 3, yang mana target ini telah direalisasikan sebanyak 3 (Tiga) Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian = (Realisasi Target/ Rencana Target)*100%

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Ketata Usahaan Tahun 2025 yaitu Rp 7.059.954.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2.025.244.000,- serta anggaran pengadaan belanja sebesar Rp 1.500.000.000,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 4.016.206.096,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Operasional dan Pemeliharaan Kantor (4670.EBA.994.002). Dan Pengadaan Belanja Modal Lainnya (4640.EBB.907.051)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan dimaksud telah dilaksanakan dan telah mencapai target pada Perjanjian Kinerja, adapun upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

- Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalamhal pengembangan Kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM pengelola pengadaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar mampu melaksanakan tugas dengan efisien dan efektif, sesuai dengan perubahan regulasi dan teknologi terbaru
- Penataan Proses Pengadaan yang Efisien dan Transparan dimulai dengan perencanaan yang baik, penyederhanaan prosedur dan percepatan belanja
- Peningkatan Kolaborasi dan Kapasitas Pelaku Usaha dengan cara melakukan konsolidasi pengadaan untuk mencapai efisiensi, akurasi, dan transparansi yang lebih tinggi, serta menerapkan prinsip value for money

III.11.7 IKK 4.8 Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat merupakan kegiatan rutin kepegawaian. Adapun Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat antara lain Peningkatan Kompetensi ASN, Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Peta Manajemen Talenta

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat yang sudah diselesaikan BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar 16 (Enam Belas) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 16 (Enam Belas) maka capaian kinerja mencapai 100% (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

Gambar IV. 22 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (dan perubahannya, PP Nomor 17 Tahun 2020)

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB)

b) Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu Tugas dan Fungsi BPTD adalah Pengelolaan Urusan SDM

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat memiliki 16 (Enam Belas) Target yaitu Peningkatan Kompetensi ASN , Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Peta Manajemen Talenta.

c) Faktor Keberhasilan

- Pemimpin berperan penting dalam memotivasi dan menginspirasi timnya. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja, kolaborasi, dan produktivitas.
- Pemimpin memberikan keteladanan akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari timnya. Kepercayaan ini sangat penting untuk lingkungan kerja yang sehat.
- Pemimpin mampu mengelola dan menyelesaikan konflik secara bijaksana dapat mencegah ketegangan dan menjaga kekompakan tim

d) Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

- Komunikasi yang buruk antara atasan dan staf, serta antar sesama rekan kerja, dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan konflik yang tidak terselesaikan
- Pengambilan keputusan yang tidak transparan atau tidak adil, terutama dalam hal promosi, kenaikan gaji, dan beban kerja, dapat menurunkan motivasi dan moral karyawan
- Manajemen konflik yang buruk

e) Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat sebesar 100 % (Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

f) Perhitungan Capaian Kinerja

Pada Indikator Kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat memiliki target sebesar 16, yang mana target ini telah direalisasikan sebanyak 16 (enam belas) Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

(Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).

g) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Ketata Usahaan Tahun 2025 yaitu Rp 68.163.901.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2.025.244.000,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 67.440.875.128,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Gaji dan Tunjangan (4671.EBA.994.001) dan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan (4640.FAE.923.923.A)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi para manajer dan supervisor untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, dan motivasi tim
- Mengimplementasikan sistem manajemen kinerja yang efektif, termasuk penetapan tujuan yang jelas, evaluasi berkala, dan umpan balik yang konstruktif

III.12 REALISASI ANGGARAN

III.12.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

c) Pagu Anggaran

Pagu Anggaran Awal Tahun 2025 Posisi 01 Januari 2025 sebesar **Rp. 187.037.191.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

4) Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

Rupiah Murni :		Rp.160.557.555.000	90,01%
PNBP	:	Rp. 56.356.886.000	16,73%
SBSN	:	-	
Total	**:**	**Rp. 216.914.441.000**	**70.97%**

5) Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Belanja Pegawai	:	Rp.	67.586.527.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	70.978.608.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	78.349.306.000,-
Total	**:**	**Rp.**	**216.914.441.000,-**

6) Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 5602 1606 1531 3979 pada tanggal 22 Februari 2025 (Revisi ke-1);

b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 5602 1606 1531 3979 pada tanggal 28 Februari 2025 (Revisi ke-2).

c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 9423 0370 8096 4054 pada tanggal 24 Maret 2025 (Revisi ke-3).

d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 9423 0370 8096 4054 pada tanggal 24 Maret 2025 (Revisi ke-4).

e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 9423 0370 8096 4054 pada tanggal 22 April 2025 (Revisi ke-5).

f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 9423 0370 8096 4054 pada tanggal 15 Mei 2025 (Revisi ke-6);

g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 9423 0370 8096 4054 pada tanggal 01 Juli 2025 (Revisi ke-7);

h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 9423 0370 8096 4054 pada tanggal 09 Juli 2025 (Revisi ke-8);

i. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 9423 0370 8096 4054 pada tanggal 11 Agustus 2025 (Revisi ke-9);

j. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 9423 0370 8096 4054 pada tanggal 12 September 2025 (Revisi ke-10);

k. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 9423 0370 8096 4054 pada tanggal 25 Sep 2025 (Revisi ke-11);

l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2025 kode *digital stamp* : 9423 0370 8096 4054 pada tanggal 02 Okt 2025 (Revisi ke-12);

d) Blokir Efisiensi Tahun 2025

Berdasarkan Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat mengalami perubahan pagu menjadi Rp. 216.914.441.000,-.

1) Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	KETERANGAN	RM	PNBP	SBSN	TOTAL ANGGARAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Pagu Awal	133.203.101.000	53.834.090.000	-	187.037.191.000
2.	Revisi ke-01	133.203.101.000	53.834.090.000	-	187.037.191.000
3.	Revisi ke-02	133.203.101.000	53.834.090.000	-	187.037.191.000
4.	Revisi ke-03	133.203.101.000	53.834.090.000	-	187.037.191.000
5.	Revisi ke-04	133.203.101.000	53.834.090.000	-	187.037.191.000
6.	Revisi ke-05	133.203.101.000	53.834.090.000	-	187.037.191.000
7.	Revisi ke-06	133.203.101.000	53.834.090.000	-	187.037.191.000
8.	Revisi ke-07	133.203.101.000	53.834.090.000	-	187.037.191.000
9.	Revisi ke-08	133.203.101.000	53.834.090.000	-	187.037.191.000
10.	Revisi ke-09	150.621.180.000	53.834.090.000	-	204.455.270.000
11.	Revisi ke-10	160.574.995.000	56.356.886.000	-	216.931.881.000
12.	Revisi ke-11	160.574.995.000	56.356.886.000	-	216.931.881.000
13.	Revisi ke- 12	138.236.200.000	78.678.241.000	-	216.914.441.000

Tabel IV. 4 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
Sumber : Pengelola Keuangan BPTD Jabar

2) Rincian Realokasi Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	KODE AKUN	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI S.D. 31 DESEMBER 2025 (Rp)	%	KENDALA/HAMBATAN/JUSTIFIKASI
1	2	3	4	5	6=5/4	6
PNBP FUNGSIONAL						
1	425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	243.000.000	21.000.000	8,64%	
2	425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	35.000.000	4.620.000	13,20%	
3	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		279.060		
4						
TOTAL PNBP FUNGSIONAL			***278.000.000***	***25.899.060***	**9,32%**	
PNBP UMUM						
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	300.000.000	478.115.750	159,37%	
2	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	16.993.947		
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5.007.339		
4	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	830.371.298		
5	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	367.293.653		
TOTAL PNBP UMUM			**300.000.000**	**1.697.781.987**	**565,93%**	
TOTAL PNBP FUNGSIONAL & UMUM			**578.000.000**	**1.723.681.047**	**298,21%**	

Tabel IV. 5 Rincian Realokasi Per Sumber Dana Tahun 2025
Sumber : Pengelola Keuangan BPTD Jabar

III.12.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN			EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
			NILAI (Rp)	% THD PAGU TOTAL	% THD PAGU EFEKTIF	
A.	**BELANJA PEGAWAI**	**67.586.527.000**	**67.336.086.473**	**99,63**	**99,63**	
B.	**BELANJA BARANG**	**70.978.608.000**	**55.877.193.545**	**78,72**	**97,88**	**13.891.055.000**
	RM	68.172.808.000	55.702.489.424	81,71	97,87	11.260.255.000
	PNBP	2.805.800.000	174.704.121	6,23	99,83	2.630.800.000
C	**BELANJA MODAL**	**78.349.306.000**	**30.740.109.433**	**39,23**	**99,64**	**47.498.969.000**
	RM	24.798.220.000	21.486.384.782	86,64	99,51	3.205.679.000
	PNBP	53.551.086.000	9.253.724.651	17,28	99,96	44.293.290.000
	TOTAL	**216.914.441.000**	**153.953.389.451**	**70,97**	**98,99**	**61.390.024.000**

Tabel IV. 6 Realisasi Anggaran s/d bulan Desember Tahun 2025
Sumber : Pengelola Keuangan BPTD Jabar

III. 13 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

III.13.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Dapat di tarik kesimpulan bahwa angka capaian kinerja sasaran yang sudah mencapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran yang tercatat sebesar 100% dari pagu efisiensi Tahun 2025. Efisiensi ini dapat diartikan sebagai hasil dari pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 yang telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta komitmen untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

NO	Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM
1	772	772	Realisasi/kebutuhan sdm = capaian

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan relaisasi SDM sebesar 772 pegawai, dengan jumlah kebutuhan SDM BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar 772 pegawai, menunjukkan capaian SDM sebesar 100%. Dimana realisasi tersebut terdiri atas 320 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 432 PPPK, dan 20 *Outsourching*.

III.14 HAMBATAN DAN KENDALA

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami beberapa hambatan ataupun kendala yaitu Masih adanya anggaran yang terkena Blokir Efisiensi Anggaran pada tahun ini sehingga daya serap anggaran belum maksimal.

BAB IV
PENUTUP

IV. PENUTUP

IV.1. RINGKASAN CAPAIAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan Renstra Tahun 2025-2029, yakni merupakan pelaksanaan tahun pertama, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil 22 (dua puluh dua) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilali capaian lebih besar atau sama dengan 100% dari 8 (delapan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai beruikut :
    a. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 6 Trayek dari Target Tahun 2025 6 Trayek;
    b. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 2 Lintasan dari Target Tahun 2025 2 Lintasan;
    c. Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM telah direalisasikan 100% yaitu sebanyak 1 paket dari Target Tahun 2025 1 Paket;
    d. Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 10 Lokasi dari Target Tahun 2025 10 Lokasi;
    e. Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 1 Unit dari Target Tahun 2025 1 Unit;
    f. Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 6 Lokasi dari Target Tahun 2025 6 Lokasi;
    g. Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 7 Kegiatan dari Target Tahun 2025 7 Kegiatan;
    h. Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 5 Lokasi dari Target Tahun 2025 5 Lokasi;
    i. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 3 Kegiatan dari Target Tahun 2025 3 Kegiatan;

j. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 4 Kegiatan dari Target Tahun 2025 4 Kegiatan;
k. Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan telah direalisasikan 100% yaitu sebanyak 1 Unit dari Target Tahun 2025 1 Unit;
l. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 1 Laporan dari Target Tahun 2025 1 Laporan;
m. Jumlah kegiatan terkait Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 2 Kegiatan dari Target Tahun 2025 2 Kegiatan;
n. Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 22 Kegiatan dari Target Tahun 2025 22 Kegiatan;
o. Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 1 Lokasi dari Target Tahun 2025 1 Lokasi;
p. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat telah terealisasi 100% yaitu sebanyak 1 Kegiatan dari Target Tahun 2025 1 Kegiatan;
q. Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) telah terealisasi 100% yaitu senilai 82,5 dari Target Tahun 2025 82,5;
r. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPTD Kelas I Jawa Barat telah terealisasi 100% yaitu senilai 95% dari Target Tahun 2025 95%;
s. Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) telah terealisasi 100% yaitu senilai 60% Kegiatan dari Target Tahun 2025 60%;
t. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) yang telah direalisasikan 100% yaitu senilai 80 dari Target Tahun 2025 senilai 80;
u. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa telah terealisasi 100% dengan 3 Kegiatan dari Target Tahun 2025 3 Kegiatan;
v. Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) telah direalisasikan 100% dengan 16 Kegiatan dari Target Thaun 2025 16 Kegiatan.

2. Realisasi Pencapaian Kinerja BPTD Kelas I Jawa Barat dengan rata-rata persentase capaian SK padaseluruh kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% dan rata-rata persentase capaian IKK pada seluruh kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% pada seluruh kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025.

3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang professional, akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien dengan pelayanan yang prima.

IV.2. HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
1	SK 2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	6	6	100%	Evaluasi pada capaian anggaran dimana Proses verifikasi terlambat karena menunggu bukti biaya untuk termin 3	Akan direalisasikan diawal bulan Oktober	Bidang Sarana
2	SK 3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	10	7	0	0	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A masih terkendala blokir efisiensi anggaran sebesar **Rp. 721.581.000** dari Total anggaran **Rp. 733.420.000** sehingga monev hanya melalui media online namun tidak maksimal	Mengoptimalkan ketersediaan anggaran dan mengupayakan penambahan anggaran dari program realokasi anggaran	Bidang Sarana
3	SK 5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5.2	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	2	2	2	100%	Lebih cepat dari rencana yang telah ditetapkan	Sisa anggaran akan direalisasikan secara proposional sesuai dengan rencana pencairan	Bidang Sarana
4	SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Paket	1	0	0	0	Uang Muka telah direalisasikan dan kegiatan sedang dalam pelaksanaan	Sisa anggaran akan direalisasikan secara proposional sesuai dengan rencana pencairan	Bidang Prasarana
			IKK 7.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi	10	10	10	100%	Kegiatan operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM terkendala blokir efisiensi anggaaran sebesar **Rp. 683.218.000** dari Total anggaran **Rp. 19.168.540.000**	Akan direalisasikan secara proposional sesuai dengan rencana pencairan dan sesuai dengan anggaran yang tersedia	Bidang Prasarana
			IKK 7.5	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Lokasi	6	6	6	100%	Kegiatan operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM terkendala blokir	Akan direalisasikan secara proposional sesuai dengan rencana pencairan dan sesuai	Bidang Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
										efisiensi anggaaran sebesar **Rp. 1.747.533.000** dari Total anggaran **Rp. 8.921.565.000**	dengan anggaran yang tersedia	
			IKK 7.6	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	2	0	0	0	Kegiatan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok terkendala blokir efisiensi anggaaran sebesar **Rp. 2.823.534.000** dari Total anggaran **Rp. 2,886,870,000** sehingga monev hanya melalui media online namun tidak maksimal	Mengoptimalkan ketersediaan anggaran dan mengupayakan penambahan anggaran dari program realokasi anggaran	Bagian Tata Usaha
			IKK 7.7	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Kegiatan	4	2	2	50%	Pengawasan Teknis Keselamatan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru masih dalam tahap persiapan, sedangkan event khusus pada masa Angleb telah dilaksanakan	Akan direalisasikan secara proposional pada Triwulan IV sesuai dengan rencana kegitan yang telah direncanakan	Bidang Lalu Lintas
5	SK 8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5	5	5	100%	Kegiatan operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM terdapat blokir efisiensi anggaaran sebesar **Rp. 92.758.000** dari Total anggaran **Rp. 1,405,673,000**	Mengoptimalkan ketersediaan anggaran dan mengupayakan penambahan anggaran dari program realokasi anggaran	Bidang Prasarana
6	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3	2	2	67%	Kegiatan Inspeksi Keselamatan Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang merupakan Anggaran tambahan pada pertengan bulan September. Kegiatan dimaksud masil dalam pelaksanaan	Akan direalisasikan secara proposional pada Triwulan IV sesuai dengan rencana kegitan yang telah direncanakan	Bidang Lalu Lintas

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
			IKK 9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3	2	2	67%	Kegiatan Pengawasan Penindakan ODOL merupakan Anggaran Tambahan pada pertengahan bulan September. Kegiatan dimaksud masih dalam pelaksanaan	Akan direalisasikan secara proposional pada Triwulan IV sesuai dengan rencana kegitan yang telah direncanakan	Bidang Lalu Lintas
			IKK 9.3	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Laporan	1	0	0	0	Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri dan Evaluasi MRLL dan Andalalin terdapat blokir efisiensi anggaaran sebesar **Rp. 1.384.257.000** dari Total anggaran **Rp. 1.638.650.000** sehingga pengawasan kegiatan dimaksud belum optimal	Mengajukan permohonan penambahan anggaran dari program Realokasi Anggaran	Bidang Lalu Lintas
			IKK 9.4	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	1	0	0	0		Mengajukan permohonan penambahan anggaran dari program Realokasi Anggaran	Bidang Lalu Lintas
			IKK 9.5	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	3	2	1	33%	Kegiatan pengawasan pengadaan pemasangan alat perlengkapan jalan, telah dilaksanakan satu kegiatan, untuk duabelas kegiatan pengawasan lainnya masih tahap proses pengawasan	Akan direalisasikan secara proposional pada Triwulan IV sesuai dengan rencana pencairan	Bidang Lalu Lintas
			IKK 9.6	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	0	0	0	Terdapat blokir efisiensi anggaaran sebesar **Rp. 791.193.000** dari Total anggaran **Rp. 5.448.392.000** dan dalam tahap inventarisasi faskes yang akan dipelihara pada ruas jalan nasional di wilayah Jawa Barat	Target pelakasanaan pemeliharan pada bulan Oktober	Bidang Lalu Lintas

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
7	SK 10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Laporan	12	9	9	0	Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman dan kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah terkendala blokir efisiensi anggaaran sebesar **Rp. 571.458.000** dari Total anggaran **Rp. 583.900.000** sehingga kegiatan pemeriksaan dan pengujian tidak bisa dilaksanakan, anggaran yang tersedia saat ini hanya digunakan untuk ATK pelaporan	Akan direalisasikan secara proposional pada Triwulan IV sesuai dengan ketersediaan anggaran setelah blokir dan sesuai rencana yang telah ditetapkan	Bidang Sarana
			IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	3	0	0		Akan direalisasikan secara proposional pada Triwulan IV sesuai dengan ketersediaan anggaran setelah blokir dan sesuai rencana yang telah ditetapkan	Bidang Sarana
			IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian Berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	1	0	1	100%	Kegiatan pengujian Alat Pengujian Berkala yang menerapkan blue full cycle terdapat blokir efisiensi anggaaran sebesar **Rp. 112.976.000** dari Total anggaran **Rp. 115.000.000** sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat terlaksana, anggaran yang tersedia saat ini hanya digunakan untuk ATK pelaporan	Akan direalisasikan secara proposional pada Triwulan IV sesuai dengan ketersediaan anggaran setelah blokir dan sesuai rencana yang telah ditetapkan	Bidang Lalu Lintas
8	SK 11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Kegiatan	3	2	1	33%	Kegiatan pengadaan dan pemasangan Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi	Akan direalisasikan secara proposional pada Triwulan IV sesuai dengan ketersediaan anggaran	Bidang Lalu Lintas

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
										teknis terdapat blokir anggaran sebesar **Rp.3.043.679.000** dari total Anggaran sebesar **Rp. 17.669.578.000** adapun kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran setelah blokir efisiensi	setelah blokir dan sesuai rencana yang telah ditetapkan	
9	SK 13	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 13.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	4	1	0	0	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan **Rp. 2.823.534.000** dari Total anggaran **Rp. 2,886,870,000**	Kegiatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan blokir efisiensi anggaran	Bagian Tata Usaha
			IKK 13.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	1	0	0	0	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan **Rp. 2.823.534.000** dari Total anggaran **Rp. 2,886,870,000**	Kegiatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan blokir efisiensi anggaran dan akan di realisasikan pada Triwulan IV	Bagian Tata Usaha
			IKK 13.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP BPTD Kelas I Jawa Barat	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan **Rp. 2.823.534.000** dari Total anggaran **Rp. 2,886,870,000**	Kegiatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan blokir efisiensi anggaran dan akan di realisasikan pada Triwulan IV	Bagian Tata Usaha
			IKK 13.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	15	12	12	80%	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan **Rp. 2.823.534.000** dari Total anggaran **Rp. 2,886,870,000**	Kegiatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan blokir efisiensi anggaran dan akan di realisasikan pada Triwulan IV	Bagian Tata Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
			IKK 13.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	Terkendala blokir efisiensi anggaaran sebesar **Rp. 2.025.244.000** dari Total anggaran **Rp. 7.059.954.000**	Mengoptimalkan ketersediaan anggaran dan mengupayakan penambahan anggaran dari program realokasi anggaran	Bagian Tata Usaha
			IKK 13.6	Kegiatan Pengelolaan Aset BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	3	2	2	67%	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan **Rp. 2.823.534.000** dari Total anggaran **Rp. 2,886,870,000**	Kegiatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan blokir efisiensi anggaran dan akan di realisasikan pada Triwulan IV	Bagian Tata Usaha
			IKK 13.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan BPTD Kelas I Jawa Barat	Kegiatan	1	0	0	0	Terkendala blokir efisiensi anggaaran sebesar **Rp. 2.025.244.000** dari Total anggaran **Rp. 7.059.954.000**	Mengoptimalkan ketersediaan anggaran dan mengupayakan penambahan anggaran dari program realokasi anggaran	Bagian Tata Usaha
			IKK 13.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	0	1	50%	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan **Rp. 2.823.534.000** dari Total anggaran **Rp. 2,886,870,000**	Kegiatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan blokir efisiensi anggaran dan akan di realisasikan pada Triwulan IV	Bagian Tata Usaha
			IKK 13.10	Kegiatan Pengelolaan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	2	0	0	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan **Rp. 2.823.534.000** dari Total anggaran **Rp. 2,886,870,000**	Kegiatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan blokir efisiensi anggaran dan akan di realisasikan pada Triwulan IV	Bagian Tata Usaha
			IKK 13.11	Kegiatan mendukung penerapan Zona Integritas (ZI)	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan **Rp.**	Kegiatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan blokir	Bagian Tata Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
										2.823.534.000 dari Total anggaran **Rp. 2,886,870,000**	efisiensi anggaran dan akan di realisasikan pada Triwulan IV	
			IKK 13.12	Kegiatan mendukung kebijakan dan reformasi hukum	Dokumen	1	1	0	0	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin setiap bulanya	Direalisasikan secara proposional setiap bulanya	Bagian Tata Usaha
	Rata Rata Persentase Capaian SK								**51,3%**			
	Rata Rata Persentase Capaian IKK								**34,9%**			
	Jumlah IKK Yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100% (IKK≥100%)								**6**			
	Jumlah IKK Kurang Dari 100% (0%≤IKK<100%)								**24**			

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
1.	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6	6	6	6	Kegiatan layanan keperintisan jalan sudah selesai dilaksanakan	-	Bidang Sarana
2.	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1.B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	2	2	2	2	kegiatan layanan RO-RO Long Distance Ferry Patimban - Banjarmasin dan Patimban - Pontianak sudah selesai dilaksanakan	-	Bidang Sarana
3.	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Paket	1	1	1	1	Kegiatan Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sudah selesai dilaksanakan walaupun terkendala blokir efisiensi anggaran Rp. 15.590.000.000 dari total anggaran sebesar Rp. 20.500.000.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 4.910.000.000. Realisasi anggaran setelah blokir efisiesnsi sebesar 23.95% dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan	-	

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
			IKK 2.1.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi	10	10	10	10	Kegiatan Terminal Penumpang Tipe-A dikelola terkendala blokir efisiensi anggaran Rp. 683.218.000 dari total anggaran sebesar Rp. 20.621.451.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 19.938.233.000.realisasi anggaran setelah blokir efisiensi sebesar 96.67% dan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan	-	Bidang Prasarana
			IKK 2.1.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1	1	1	Kegiatan Perbaikan Perangkat JTO di UPPKB sudah selesai dilaksanakan	-	Bidang Prasarana
			IKK 2.1.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	6	6	6	6	Kegiatan Operasional UPPKB terkendala blokir efisiensi anggaran Rp. 2.210.337.590 dari total anggaran sebesar Rp. 9.585.755.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 7.375.417.410. Realisasi anggaran setelah blokir sebesar 81.77% dan kegiatan	-	Bidang Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
										sudah selesai dilaksanakan		
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	7	7	7	7	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat (Bidang Lalu Lintas) terkendala blokir efisiensi anggaran Rp. 943.036.000 dari total anggaran sebesar Rp. 2.987.070.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 2.044.034.000. realisasi anggaran setelah blokir sebesar 25.71% dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan	-	Bidang Lalu Lintas
4.	SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 2.2.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5	5	5	5	Kegiatan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan terkendala blokir efisiensi anggaran Rp. 97.275.870 dari total anggaran sebsar Rp. 1.405.673.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 1.308.397.130 dan realisasi anggaran sebesar 93.39% dan	-	Bidang Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
										sudah selesai dilaksanakan		
5.	SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3	3	3	3	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat (Bidang Sarana) terkendala blokir efisiensi anggaran Rp. 2.155.800.000 dari total anggaran sebesar Rp. 2.555.800.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 400.000.000 dan realisasi anggaran sebesar 15.65% dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan	-	Bidang Sarana
			IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	4	4	4	4	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Over Dimension Over Loading sudah selesai dilaksanakan	-	Bidang Lalu Lintas
			IKK 3.1.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung	Unit	1	1	1	1	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Penunjang UPPKB sudah selesai dilaksanakan	-	Bidang Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
6.	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi *active* dan *passive safety*	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Laporan	1	1	1	1	Kegiatan Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalulintas dan Angkutan terkendala blokir efisiensin anggaran Rp. 571.458.137 dari total anggaran sebesar Rp. 583.900.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 12.441.863 realisasi anggaran setelah di blokir efisiensi sebbesar 100% dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan	-	Bidang Sarana
			IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi	Kegiatan	2	2	2	2		-	
7.	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Kegiatan	22	22	22	22	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) terkendala blokir efisiensi anggaran sebesar RP. 3.834.872.000 dari total Rp. 26.160.594.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 22.325.722.000. Realisasi anggaran setelah di blokir efisiensi sebesar 84.79% dan	-	Bidang Lalu Lintas

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
										kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	1	1	1	1	Kegiatan Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) sudah selesai dilaksanakan	-	Bidang Lalu Lintas
8.	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	1	1	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan terkendala blokir efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.823.534.000 dari total anggaran sebesar Rp. 2.886.870.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp.63.336.000. Realisasi anggaran setelah di blokir efisiensi sebesar 100% dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan	-	Bagian Tata Usaha
			IKK 4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	82,5	82,5	82,5	82,5	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan terkendala blokir efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.823.534.000 dari	-	

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
										total anggaran sebesar Rp. 2.886.870.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp.63.336.000. Realisasi anggaran setelah di blokir efisiensi sebesar 100% dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
			IKK 4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis	Presentase	95	95	95	95	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor terkendala blokir efisiensi sebesar Rp. 4.439.554.000 dari total anggaran sebesar Rp. 7.059.954.000 sehingga anggaran yang dapat di gunakan sebesar Rp.2.620.400.000. Realisasi anggaran setelah blokir efisiensi sebesar 71.31% dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan	-	
			IKK 4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	60	60	60	60	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan terkendala blokir efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.823.534.000 dari total anggaran sebesar	-	

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
										Rp. 2.886.870.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp.63.336.000. Realisasi anggaran setelah di blokir efisiensi sebesar 100% dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
			IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	80	80	80	80	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan terkendala blokir efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.823.534.000 dari total anggaran sebesar Rp. 2.886.870.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp.63.336.000. Realisasi anggaran setelah di blokir efisiensi sebesar 100% dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan	-	
			IKK 4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	3	3	3	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor terkendala blokir efisiensi sebesar Rp. 4.439.554.000 dari total anggaran sebesar Rp. 7.059.954.000 sehingga anggaran yang	-	

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
										dapat di gunakan sebesar Rp.2.620.400.000. Realisasi anggaran setelah blokir efisiensi sebesar 82,8% , dan untuk anggaran pembelanjaan modal lainnya tidak terdapat pemblokiran anggaran, realisasi anggaran sebesar 79.85% dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
			IKK 4.8	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	16	16	16	16	Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bidang Ketatausahaan terkendala blokir efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.823.534.000 dari total anggaran sebesar Rp. 2.886.870.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp.63.336.000. Realisasi anggaran setelah di blokir efisiensi sebesar 100% dan untuk anggaran gaji dan tunjangan tidak terdapat pemblokiran anggaran, realisasi anggaran sebesar 98.94% dan	-	

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							T	R	C			
										kegiatan sudah selesai dilaksanakan		